

Naskah Perencanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional Pada Milenium III

Direktorat
Kebudayaan

01



PUSAT PENELITIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Badan Penelitian dan Pengembangan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jakarta, 1999

Naskah Perencanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional Pada Milenium III

Oleh:

Drs. Philip Suprastowo (Puslit Dikbud)
Dr. S. Belen (Pusbangkurandik)
Drs. Hary Waluyo, M.A. (Dirjenbud)
Drs. Abdul Azis, M.Sc. (Depag)
Drs. Bambang Suwarsono (Dirjenbud)
Drs. Soeryono, M.A. (Pendidik, Widyaswara)
Drs. Darmawan Sumantri (Puslit Dikbud)

Penyunting:

Soepardi, M.Sc.



PUSAT PENELITIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Badan Penelitian dan Pengembangan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jakarta, 1999

Katalog Dalam Terbitan

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan

Naskah perencanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan
nasional pada Milenium III/oleh Tim Peneliti. -- penyunting
Soepardi, M.Sc. -- Jakarta: Puslit Balitbang Dikbud, 1999.
v, 60hal

ISBN 979-401-395-1

306

1. PERENCANAAN

2. KEBUDAYAAN

I. Judul

II. Soepardi

© 1999 Puslit Balitbang Dikbud

Dilarang mereproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis
dari Puslit Balitbang Dikbud

KATA PENGANTAR

Kebijakan pembangunan Kebudayaan nasional merupakan upaya konsisten untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32 yang menyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pembangunan Kebudayaan nasional senantiasa diarahkan untuk memenuhi dua fungsi pokok, yakni fungsi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya.

Perkembangan dan pengaruh global di bidang Iptek, ekonomi, dan sosial budaya saat ini dan di masa mendatang, serta tuntutan reformasi terhadap berbagai sistem kehidupan yang kurang memberikan iklim yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia Indonesia, memberikan konsekuensi terhadap perlunya reorientasi kebijakan pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional di masa depan.

Pembangunan kebudayaan nasional masa depan diharapkan mampu mengantisipasi kondisi dan tantangan masa depan, yakni kebudayaan Indonesia modern yang mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa yang beradab dan mampu beradaptasi dalam budaya global.

Bahan tulisan ini merupakan hasil pemikiran awal dari Tim perumus yang dibentuk oleh Puslit Balitbang Dikbud yang berisi rumusan nilai-nilai utama dari kebudayaan masa depan yang dipandang perlu untuk diprioritaskan dalam penetapan kebijakan dan program pengembangan dan pembinaan kebudayaan. Nilai utama tersebut antara lain adalah tentang 1. Hak Asasi Manusia, 2 Estetika, Etika dan Moral, 3. Kesatuan dan Persatuan Bangsa, 4. Kemandirian, 5. Iptek, 6. Etos Kerja, 7. Bahasa dan Sastra, serta 8. Kesehatan dan olahraga.

Kami mengharapkan masukan dan kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaan pemikiran ini agar dapat digunakan sebagai pijakan yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 1998
Kepala Puslit Dikbud



Dr. Jiyono
Nip. 130691257

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemikiran.....	1
B. Visi Pengembangan dan Pembinaan.....	6
C. Misi Departemen.....	7
 BAB II PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN MASA DEPAN	
A. Hak Asasi Manusia (HAM)	8
B. Estetika, Etika dan Moral.....	16
C. Persatuan dan Kesatuan Bangsa.....	23
D. Masyarakat Mandiri	28
E. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	36
F. Etos Kerja	42
G. Bahasa dan Sastra	47
H. Kesehatan dan Olah Raga.....	53
 BAB III PENUTUP	
Pustaka Acuan	58
	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Tahun-tahun terakhir abad ke-20 ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian berat menyangkut masa depannya. Krisis ekonomi yang disusul dengan krisis politik masih berlangsung dan belum menampakkan gejala segera pulih dalam waktu dekat (Abdul Aziz 1998). Krisis tersebut antara lain disebabkan oleh merebaknya sikap dan perilaku permisif terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah berlangsung lama. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai profesionalisme, supremasi hukum dan etika universal bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks ini, persoalannya adalah bagaimana kondisi buruk ini dapat dibenahi dan berkembang menjadi peri kehidupan yang lebih baik melalui upaya mengakomodasi tuntutan perubahan dari masyarakat (Suprastowo 1998).

Krisis tersebut telah memicu kerusuhan demi kerusuhan. Kerusuhan bukan hanya monopoli kota besar, melainkan telah menjalar pula ke kota-kota kecil. Berbagai tindak kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban yang secara sah memiliki monopoli atas perangkat kekerasan (*organized violence*), melainkan telah pula dilakukan oleh masyarakat kebanyakan. Perbedaan-perbedaan provinsial dan konflik horisontal cenderung meningkat dan pertarungan ideologi, kekuatan politik dan bahkan agama mulai mewarnai kehidupan masyarakat (Abdul Aziz 1998).

Dampak lanjutan krisis tersebut yang muncul adalah pertanyaan besar menyangkut masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia serta kebudayaannya. Jika pembangunan berkelanjutan selama tiga dasawarsa ternyata berujung dengan kekerasan, intoleransi dan semangat membesar-besarkan perbedaan, kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang utuh dan masyarakat yang bersatu di masa datang, patut dipertanyakan. Jika persatuan bangsa dan kesatuan masyarakat sedang dalam persoalan

serius, keutuhan dan pengembangan budaya Indonesia pada akhirnya menjadi problem besar.

Dua problem besar tersebut, yaitu masa depan kebudayaan nasional Indonesia dan jaminan integrasi bangsa yang menjadi landasan pengembangan kebudayaan tersebut, memerlukan perhatian dan penanganan sungguh-sungguh dari semua komponen bangsa, terutama dari aparat pemerintah yang terkait. Kenyataan bahwa krisis yang tengah dialami bangsa Indonesia telah menimbulkan gejala yang mengarah kepada disintegrasi sepantasnya menyadarkan semua komponen bangsa agar selalu menempatkan integrasi nasional sebagai prioritas utama penanggulangan dampak krisis, untuk selanjutnya terus diperkokoh melalui berbagai langkah penyadaran warga bangsa.

Masa depan kebudayaan nasional Indonesia juga sedang dalam pertaruhan, ketika "citra budaya" yang pernah tertanam dengan baik tiba-tiba memunculkan hal sebaliknya, khususnya dalam situasi krisis. Bangsa Indonesia yang pernah dicitrakan sebagai "bangsa yang ramah" dan "bangsa yang religius" ternyata mencatat banyak peristiwa kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh negara maupun oleh masyarakat, penjarahan, pembakaran fasilitas umum, termasuk rumah ibadah, pelecehan hukum serta bentrokan fisik antar-warga. (Abdul Aziz 1998).

Globalisasi yang semakin mengaburkan batas-batas geografis antar-bangsa dan negara menghasilkan masyarakat yang makin terbuka yang menunjang kerja sama antar-masyarakat dan antarbangsa. Selain itu, meningkat pula kompetisi antar-masyarakat dan antarbangsa. Globalisasi dapat sekaligus melahirkan dampak positif atau negatif bergantung pada kesiapan dan kemampuan suatu bangsa (Tilaar 1998). Dampak tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Peluang lebih besar untuk memasarkan hasil produksi barang dan jasa bagi bangsa yang telah mampu menghasilkan produk yang lebih bermutu. Sebaliknya, produk bangsa yang kurang bermutu akan kalah bersaing dan akibatnya bangsa tersebut akan menjadi konsumen produk bermutu bangsa lain.

2. Harga barang dan jasa bisa lebih murah akibat persaingan terbuka yang melibatkan berbagai bangsa. Akan tetapi, kapitalisme yang memungkinkan perusahaan yang kuat mengalahkan perusahaan yang lemah pada akhirnya dapat melahirkan monopoli global atas produk barang dan jasa tertentu. Yang memiliki monopoli dapat mendikte harga yang paling menguntungkan.
3. Globalisasi membawa peluang lebih besar kepada suatu bangsa untuk memperkenalkan budayanya kepada bangsa-bangsa lain. Namun, di pihak lain globalisasi dapat mengancam eksistensi budaya lokal karena budaya global dapat amat dominan karena ditransmisi melalui teknologi informasi yang dikuasai bangsa-bangsa tertentu. Bahkan, globalisasi dapat memunculkan "agama baru" yang disebut "*quasi religions*" (Suprastowo 1998, Belen 1998, Tilaar 1998).

Menyimak dampak globalisasi tersebut, diperlukan kiat dan adaptasi agar bangsa Indonesia tetap *survive* dan mampu bersaing dalam era pasar bebas dan mampu memanfaatkan perkembangan Iptek pasca tahun 2000. Persoalan lain yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan, menyerap, dan mendayagunakan elemen-elemen (nilai-nilai) dari luar yang positif bagi perkembangan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan. Selain itu, perlu dicari kiat bagaimana dan dengan filter apa bangsa Indonesia dapat menyikapi dan menepis elemen-elemen (nilai-nilai) negatif dari luar karena bertentangan dengan nilai dan norma bangsa Indonesia (Suprastowo 1998).

Rontoknya ideologi komunis dan ideologi totaliter lainnya mendorong proses demokratisasi di berbagai negara. Proses demokratisasi ini antara lain ditandai oleh meningkatnya kesadaran melaksanakan hak-hak asasi manusia. (Tilaar 1998). Demokrasi tanpa hak asasi manusia adalah demokrasi semu sedangkan demokrasi yang diaktualisasi melalui penegakan hak asasi manusia adalah demokrasi yang sejati (Belen 1998).

Setiap bangsa atau kelompok masyarakat memiliki sejarah perjuangan hak asasinya sendiri-sendiri. Namun, di arena

internasional telah disepakati sejumlah hak asasi manusia yang dipandang sebagai hak fundamental yang inheren dengan kodrat dan martabat manusia seperti tertuang dalam berbagai deklarasi, konvensi dan kovenan internasional.

Dalam banyak hal hak asasi manusia yang telah menjadi kesepakatan internasional dilandasi oleh tuntutan kepada negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak asasi warga negaranya. Warga negara mungkin tak berdaya menghadapi kekuasaan negara yang amat besar, bahkan yang mungkin memperkosa hak asasi warganya. Karena itu, untuk memperkuat posisi warga negara, pemerintahan negara-negara yang melanggar hak asasi manusia perlu ditekan secara internasional, antara lain melalui lembaga-lembaga hak asasi PBB, regional dan nasional agar memiliki kemauan politik melaksanakan hak asasi manusia. Dalam hubungan ini, hak asasi manusia berciri universal, bukan partikular bergantung pada kebudayaan bangsa atau kelompok etnik tertentu. Bahkan, banyak elemen budaya bangsa atau etnik tertentu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Budaya berbagai kelompok etnik Indonesia tidak terkecuali. Untuk mendukung penegakan hak asasi manusia, elemen budaya yang kontradiktif dengan hak asasi itu perlu secara bertahap dikembangkan agar sejalan dengan tuntutan hak asasi (Belen 1998).

Penegakan hak asasi manusia secara menyeluruh dapat memperbaiki produk hukum karena tidak semua produk hukum sejalan dengan hak asasi manusia (Belen 1998). Selain itu, yang lebih penting adalah penegakan hak asasi akan menunjang penegakan hukum yang bersifat menyeluruh dan tidak memihak. Ini berarti kedudukan tiap warga negara adalah sama dan diperlakukan sama di muka hukum. Perbedaan yang ada antarwarga negara hanyalah dalam fungsi, keadaan dan status. Sistem hukum harus berada di atas perbedaan itu dan secara konsisten diterapkan pada tiap orang (Iskandar Agung 1998).

Hukum adalah produk kebudayaan yang berada di bawah nilai budaya dan norma sosial. Hukum mengatur apa yang boleh dan yang tidak boleh dikerjakan dalam bentuk aturan-aturan yang

diikuti sanksi-sanksi yang ketat. Jika hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka masyarakat Indonesia akan berkembang pesat ke arah yang lebih baik. Namun, jika hukum yang disepakati sebagai sumber acuan bersama dalam bertingkah laku tidak ditaati, sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan rusak. Manusia yang kuat akan memangsa manusia yang lemah (*homo homini lupus*) (Harry Waluyo 1998).

Dalam kaitan hubungan kebudayaan dan pendidikan, masyarakat pada umumnya menganggap sekolah sebagai suatu lembaga yang penting karena merupakan alat transformasi pengetahuan dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya serta untuk mengembangkan sifat-sifat manusia yang dapat memberikan kontribusi produk ekonomi, stabilisasi sosial, dan menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Agar dapat memainkan peran penting tersebut dalam masyarakat, sekolah harus memiliki legitimasi, yaitu kepercayaan masyarakat, bahwa lembaga itu benar-benar berjasa memenuhi kepentingan kebutuhannya serta menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memecahkan masalah (Carnoy 1977 dalam Soerjono 1998).

Dalam konteks tugas dan fungsi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berbagai problem tersebut menuntut penilaian kembali secara kritis atas tugas dan fungsi pengembangan dan pembinaan kebudayaan yang selama ini berlangsung. Sejauh ini pembinaan kebudayaan lebih diarahkan kepada pelestarian warisan budaya masa lalu dan belum banyak menyentuh kebutuhan budaya masa datang. Pembinaan nilai budaya yang diwarisi, pembinaan bahasa dan sastra, atau pembinaan muskala tetaplah penting sebagai wujud kepedulian terhadap asal-usul dan akar budaya sendiri. Hal ini sejalan dengan gagasan yang menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah.

Namun demikian, masa depan bangsa Indonesia dan kebudayaannya akan sangat bergantung pada kemampuan untuk menangkap dinamika perubahan zaman. Apa yang disebut dengan "puncak-puncak kebudayaan daerah" merupakan rumusan visioner yang terkesan lebih menatap ke belakang daripada ke depan. Visi

seperti itu luluh di hadapan fakta bahwa kebudayaan daerah manapun di Indonesia dewasa ini sedang mengalami penetrasi hebat dari kekuatan budaya Barat modern yang cenderung hegemonik. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional tidak lagi cukup dengan mengandalkan “puncak-puncak kebudayaan daerah” tanpa memperhitungkan pengaruh yang sangat besar dari kebudayaan modern tersebut (Abdul Aziz 1998).

Oleh sebab itulah, upaya pengembangan dan pembinaan kebudayaan di masa datang harus pula merambah wilayah kebudayaan baru yang relevan. Berkaca dari krisis ekonomi dan politik yang sedang berlangsung, wilayah baru itu mencakup penanaman kesadaran tentang integrasi bangsa, pengembangan etos kerja, pengembangan nilai-nilai budi pekerti, etika dan moral, penegakan demokrasi dan hak asasi manusia, penciptaan masyarakat mandiri yang mampu bertindak sesuai hati nurani setiap anggotanya, serta penanaman kesadaran tentang perlunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanis dan ramah kepada lingkungan budaya setempat. Singkatnya, pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional di masa depan memerlukan rumusan visi dan misinya.

B. Visi Pengembangan dan Pembinaan

Kebudayaan nasional Indonesia yang ingin terwujud di masa depan adalah kebudayaan yang maju, modern, dibangun secara arif dan kreatif dengan menempatkan martabat kemanusiaan sebagai rohnya, memiliki mekanisme yang lentur untuk kritik dan otokritik, terbuka bagi setiap masukan budaya dari manapun tetapi tetap ramah terhadap lingkungan budaya lokal, serta mampu memberikan sumbangan nyata bagi perkembangan peradaban umat manusia.

Dengan demikian, kebudayaan Indonesia masa depan harus dibangun bukan hanya di atas landasan capaian-capaian paling tinggi dari kebudayaan daerah, melainkan dengan memadukan berbagai capaian positif yang dibuat oleh kebudayaan masyarakat lain di dunia. Dengan sifat kebudayaan seperti itu, kreativitas yang disertai kearifan merupakan salah satu motor penggerak penting bagi pengembangan

kebudayaan, yang memungkinkan bangsa Indonesia secara dinamis menyerap unsur-unsur budaya lokal dan non-lokal yang positif, sekaligus membatasi sekecil mungkin pengaruh unsur-unsur budaya yang negatif dari manapun asalnya.

C. Misi Departemen

Dengan visi kebudayaan seperti di atas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, secara umum mempunyai misi untuk bersama komponen pemerintah yang lain dan masyarakat mewujudkan kebudayaan dimaksud. Secara khusus misi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Membina, melestarikan, dan mengembangkan warisan nilai budaya dan peninggalan sejarah dan purbakala serta menyadarkan semua komponen bangsa mengenai unsur-unsur positif dan negatif dari warisan atau peninggalan lokal tersebut.
2. Memupuk potensi semua komponen bangsa untuk mengembangkan kreativitas yang disertai kearifan dalam menyerap unsur-unsur positif budaya manapun dan mencegah sekecil mungkin pengaruh unsur-unsur negatif budaya tersebut.
3. Mendorong berkembangnya pranata budaya dalam masyarakat yang menjamin proses kritik dan otokritik budaya yang bermartabat oleh seluruh komponen bangsa.
4. Melakukan kampanye bagi terpenuhinya prasyarat pengembangan budaya baru, seperti peneguhan integrasi bangsa serta penegakan demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat yang sejati.

Sehubungan dengan itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di masa mendatang dapat lebih memberdayakan tugas dan fungsinya melalui unit pembina kebudayaan (Dirjenbud) dan jalur pendidikan dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan Nasional sesuai dengan tuntutan zaman.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN MASA DEPAN

Dalam mewujudkan kebudayaan nasional masa depan, yakni kebudayaan Indonesia yang maju dan modern yang dibangun secara kreatif, terbuka, dan menempatkan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu dipilih prioritas kebijakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya sebagai dasar bagi peri kehidupan dan kemajuan bangsa. Prioritas pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional masa depan didasarkan pada antisipasi kebutuhan masa depan, kondisi domestik saat ini, perkembangan dan tuntutan kehidupan global, serta perlunya bangsa Indonesia tetap memiliki jati diri dan kepribadian bangsa.

Nilai-nilai budaya sebagai aspek pembangunan kebudayaan nasional masa depan yang diprioritaskan adalah menyangkut: (1) Hak asasi manusia (termasuk demokrasi dan keadilan), (2) Etika, estetika, dan moral, (3) Persatuan dan kesatuan bangsa (Intergrasi), (4) Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), (5) Etos kerja, (6) "*Civil Society*" (Masyarakat madani), (7) Bahasa dan sastra, serta (8) Kesehatan dan olahraga.

A. Hak Asasi Manusia (Ham)

Hak asasi manusia (HAM) mutlak dikembangkan dalam peri kehidupan bangsa Indonesia di masa mendatang, termasuk di dalamnya nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Kemerdekaan bersikap, berpikir dan bertindak dalam rambu-rambu kemanusiaan, serta penerapan nilai-nilai keadilan sangat penting diagendakan dalam pengembangan kebudayaan masa depan agar manusia Indonesia menjadi lebih beradab, sekaligus menumbuhkan citra yang positif dalam pergaulan antar bangsa.

1. Ancaman, Kekuatan, Kelemahan dan Peluang

a. Ancaman

Sejak usai Perang Dunia II sampai dewasa ini jumlah pemerintahan yang demokratis semakin bertambah meskipun

tindakan sejumlah pemerintah otoriter di dunia ini sering mendominasi berita politik media massa. Hal ini diakibatkan proses demokratisasi yang meningkat sejak berakhirnya Perang Dunia II, pada kurun waktu mana lahir banyak bangsa yang memerdekakan diri dari penjajahan.

Posisi pemerintahan yang otoriter secara diametral bertentangan dengan demokrasi karena pemerintahan yang otoriter melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Tidak mungkin sebuah pemerintah yang otoriter mengklaim diri menegakkan HAM karena penegakan HAM sudah pasti memberikan peluang seluas-luasnya bagi warga negara untuk mempertahankan dan melaksanakan kebebasan-kebebasan fundamentalnya sebagai individu dan warga masyarakat. Pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah yang otoriter dengan sendirinya menghambat proses demokratisasi bangsanya.

Pelanggaran HAM yang berat dan berkelanjutan memperburuk citra negara Indonesia di mata dunia internasional. Keadaan ini mengurangi posisi tawar-menawar (*bargaining position*) pemerintah Indonesia dalam diplomasi internasional dan kurang menunjang upaya menarik kembali investasi asing agar dapat keluar dari krisis ekonomi.

Selain itu, aneka pelanggaran HAM yang sekian lama berlangsung menimbulkan tanda tanya dunia luar tentang makna signifikan Pancasila yang menjamin prinsip-prinsip kemanusiaan dan toleransi, keadilan, dan demokrasi. Jika pelanggaran HAM yang serius masih terus berlangsung, pemerintah Indonesia tidak bisa mempromosikan Pancasila ke dunia luar dan tak bisa membanggakan diri sebagai bangsa yang memiliki ideologi pemersatu sekian banyak kelompok etnik dan agama.

b. Kekuatan

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas

dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dengan demikian, pembukaan tersebut menyatakan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun UUD 1945 lahir 3 tahun sebelum disahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, UUD 1945 telah mencantumkan sejumlah hak asasi manusia dalam pasal-pasalnya, terutama pasal 27 - 31. Hak-hak tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Selain itu, beberapa konvensi dan konvenan HAM internasional telah diratifikasi dan dalam sidang istimewa MPR baru-baru ini telah lahir Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Baru kali ini bangsa Indonesia memiliki ketetapan tersendiri tentang HAM. Pada tahun 1993 terbentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993. Komisi ini bertujuan membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM. Untuk mencapai tujuan tersebut, komisi ini melakukan kegiatan menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM untuk kepentingan diterima dan/atau diratifikasi, memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta mengadakan kerjasama regional dan internasional. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan komisi ini mengakibatkan komisi ini memiliki kredibilitas yang cukup tinggi dan dipercaya masyarakat.

Sebelum lahir KOMNAS HAM telah ada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang advokasi dan hukum, hak kaum perempuan, pers, sosial dan keagamaan berkiprah dalam penegakan hak asasi manusia. Kegiatan LSM tersebut tampaknya semakin meningkat dalam era reformasi dewasa ini.

c. Kelemahan

Pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM) secara vertikal oleh pemerintah dan aparat keamanan terhadap warga masyarakat serta secara horisontal antara warga dengan warga, terutama berkenaan dengan masalah SARA, yang berlangsung terus-menerus dapat melewati ambang batas toleransi masyarakat. Akibat lanjutannya adalah gangguan terhadap perdamaian yang melahirkan kerusuhan, ketidakamanan, perasaan terancam eksistensinya, pertahanan diri, agresivitas. Semuanya ini menghambat proses demokratisasi dan menunjang proses disintegrasi bangsa.

Ada kesan yang salah bahwa isu HAM berasal dari luar dan digunakan negara-negara Barat untuk menekan pemerintah Indonesia. Kesan ini salah karena HAM tetap menjadi masalah-masalah di negara-negara Barat. Tiap negara Barat menghadapi masalah HAM yang spesifik yang harus selalu ditangani. Misalnya, di Amerika Serikat diskriminasi rasial terhadap orang hitam masih menjadi masalah laten yang belum sepenuhnya terpecahkan. Di Inggris warga keturunan Irlandia di Irlandia Utara merasa tak mendapatkan perlakuan yang adil. Mereka melakukan gerakan perlawanan, termasuk gerakan bersenjata. Di Kanada warga keturunan Prancis di Quebec misalnya tetap merasa tak mendapatkan status yang sama dengan warga keturunan Inggris. Di Australia kaum Aborigin merasa tak diperlakukan secara adil, bahkan mereka menuding kaum kulit putih hendak melenyapkan kelompok etnik ini (*ethnic cleansing*).

Selain itu, ada kerancuan berpikir bahwa pembicaraan tentang hak asasi harus selalu dikaitkan dengan kewajiban agar ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia menjadi isu atau masalah terutama dalam hubungan antara seorang individu, sekelompok etnik tertentu, atau para penganut agama tertentu dengan negara. Keadaan ini timbul karena dalam kenyataan pemerintah tidak memenuhi kewajibannya dalam mengakui bahwa individu, kelompok atau golongan tertentu itu memang berbeda (*distinct*) tetapi memiliki status yang sama

(*equal status*) sebagai warga negara. Banyak masalah HAM justru muncul karena pemerintah bersikap tidak adil dan melalaikan kewajibannya. Karena itu, dalam berbagai deklarasi konvensi dan konvenan HAM sering kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, serta cara kontrol terhadap pelaksanaan kewajiban itu dinyatakan secara tersendiri.

Dalam konteks Indonesia, kontrol terhadap penegakan hak asasi manusia dimasa lalu terbatas karena adanya pembatasan kebebasan pers, oposisi partai politik, kritik mahasiswa, dan pemanfaatan ABRI untuk kepentingan politik penguasa. Pengelolaan negara cenderung menjadi monolitik dan kurang memberikan ruang gerak bagi pluralisme pendapat, sikap, dan tindakan. Salah satu akibat negatif yang terlihat sekarang adalah kecenderungan kurangnya toleransi terhadap orang lain yang menganut pendapat dan sikap yang berbeda, bahkan bila perlu orangnya disingkirkan atau dihukum. Dengan kata lain, tradisi perbedaan pendapat belum membudaya.

d. Peluang

Frekuensi interaksi budaya antarwarga bangsa di dunia akan semakin banyak sejalan dengan arus globalisasi. Sejalan dengan itu, aneka pelanggaran HAM di negeri berpemerintahan otoriter yang selama ini dapat disembunyikan akan lebih terungkap karena arus demokratisasi dapat dimanfaatkan kalangan media massa dan LSM. Hal ini berlaku pula di Indonesia.

Arus demokratisasi mendorong kecenderungan internasional di berbagai kawasan untuk menegakkan HAM dan meningkatkan kesadaran global untuk menanggapi kebutuhan merumuskan konvensi dan kovenan HAM menanggapi isu aktual seperti rusaknya lingkungan hidup, bahaya senjata kimia dan perang nuklir, serta praktek aborsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arus demokratisasi yang ditunjang arus globalisasi menciptakan kondisi yang kondusif bagi penekanan perhatian terhadap pelaksanaan HAM.

2. Kebijakan

Pendidikan HAM di kalangan polisi, angkatan perang, LSM, wartawan, pendidikan sekolah, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, universitas, dan tokoh agama perlu dirintis sejak sekarang sampai menjadi tradisi.

Secara bertahap peraturan perundang-undangan, misalnya UU Subversi serta SK Menteri sampai dengan peraturan daerah, yang bertentangan dengan HAM, perlu diperbaiki atau diubah. Penegakan hukum yang konsisten dari suatu segi pandang belum menjamin terlaksananya HAM karena dalam kenyataan masih ada produk perundang-undangan tertentu yang mengandung cacat, yaitu bertentangan dengan HAM.

Penelitian tentang nilai, norma dan praktek budaya yang menunjang dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab atau HAM perlu dilakukan dan hasilnya dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan pendidikan HAM bagi berbagai golongan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penelitian tentang elemen seni yang bertentangan dengan HAM dan hasilnya dimanfaatkan untuk mengembangkan kesenian yang menjunjung tinggi prinsip HAM.

Hak individu menerapkan kebudayaan dan bahasa kelompok etniknya - yang merupakan faktor penentu dan penanda suatu kebudayaan - harus dijamin oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di SD dan SLTP tak boleh dipaksakan kepada siswa yang tak menggunakan bahasa daerah tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan/atau yang orang tuanya berasal dari kelompok etnik lain.

Selain itu, pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip HAM sehingga berkembang kosa kata dan pragmatik yang menunjang prinsip egalitarian dan demokratis antar-warga negara.

Tampilan benda budaya dan peristiwa sejarah dalam museum hendaknya memperhatikan pula pemaparan pelanggaran HAM sesuai dengan fakta sejarah agar generasi muda dapat memetik hikmahnya. Selain itu, penulisan buku sejarah hendaknya bersifat obyektif dengan memaparkan fakta pelanggaran HAM yang terjadi, terutama yang dilakukan oleh rejim yang berkuasa dan para pejuang bangsa kita sendiri. Tafsiran atas fakta sejarah hendaknya bersifat terbuka, tidak monolitik sesuai dengan tafsiran penguasa.

3. Program

a. Pembinaan Nilai-nilai Budaya

Untuk mendukung pengembangan HAM, perlu dilakukan penelitian dan pengkajian tentang nilai, norma dan praktek budaya daerah, lokal, dan suku bangsa yang menunjang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab untuk didayagunakan dalam penerapan nilai HAM dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pengembangan HAM perlu memberdayakan lembaga-lembaga kesenian kebudayaan dan sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan nilai-nilai HAM melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Untuk keperluan tersebut perlu dipersiapkan strategi, materi, dan pedoman pengajaran yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan usia peserta didik.

Penanganan masalah HAM yang perlu diprioritaskan adalah: (1) masalah diskriminasi etnik, agama dan golongan yang hidup di Indonesia; (2) akses mendapatkan pendidikan dan peluang mobilitas sosial yang lebih terbuka melalui pekerjaan atau profesi bagi golongan masyarakat marginal yang miskin; (3) masalah abortus, obat bius, narkoba dan obat terlarang; (4) masalah otonomi daerah dalam hubungan pembagian hasil eksploitasi kekayaan alam daerah dan sumber pemasukan daerah bagi pusat; (5) masalah korupsi, nepotisme, monopoli, dan *crony capitalism*; serta (6) isu gender.

Pendidikan HAM di sekolah hendaknya dilakukan dalam suatu "anyaman" yang serasi antar berbagai aktivitas, seperti kegiatan pembelajaran, praktek (*modelling*) interaksi vertikal dan horisontal antara kepala sekolah, guru, siswa. Praktek pendidikan HAM hendaknya diintegrasikan dengan pendidikan budi pekerti sehingga tidak ada aktivitas pendidikan budi pekerti yang bertentangan dengan HAM.

Pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di SD dan SLTP perlu mengembangkan nilai HAM. Siswa yang tidak menggunakan bahasa daerah tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan/atau yang orang tuanya berasal dari kelompok etnik lain, perlu diberi kebebasan untuk menentukan penggunaan bahasa (tidak dipaksakan).

b. Pembinaan Bahasa dan sastra

Hak individu menerapkan kebudayaan dan bahasa kelompok etniknya - yang merupakan faktor penentu dan penanda/identitas suatu kebudayaan - harus dijamin, dikembangkan oleh pemerintah. Pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip HAM sehingga berkembang kosa kata dan pragmatik yang menunjang prinsip egalitarian dan demokratis antarwarga negara.

c. Pembinaan Muskala (Museum, Sejarah, dan Peninggalan Purbakala)

Tampilan benda budaya dan peristiwa sejarah dalam museum hendaknya memperhatikan pula pemaparan pelanggaran HAM sesuai dengan fakta sejarah agar generasi muda dapat memetik hikmahnya.

Penulisan buku sejarah hendaknya bersifat obyektif dengan memaparkan fakta pelanggaran HAM yang terjadi dan tafsirannya hendaknya bersifat terbuka.

d. Kesenian

Penelitian tentang elemen seni yang bertentangan dan memperkuat nilai HAM perlu dilakukan dan hasilnya dimanfaatkan untuk mengembangkan kesenian yang menjunjung tinggi prinsip HAM.

B. Estetika, Etika Dan Moral

Pembangunan kebudayaan nasional harus dapat menumbuhkan-kembangkan nilai-nilai estetika, etika dan moral (termasuk budi pekerti) dalam upaya menciptakan manusia Indonesia modern yang manusiawi dan beradab. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai tersebut sangat penting diagendakan mengingat telah terjadi kemerosotan nilai-nilai budi pekerti, etika, dan moral di hampir semua lapisan masyarakat.

1. Ancaman, Kelemahan, Kekuatan dan Peluang

a. Ancaman

Semakin berkembangnya tindakan kekerasan, kejahatan, perilaku kurang terpuji, serta tindakan yang tidak didasarkan pada-nilai budi pekerti, etika dan moral pada saat ini sudah berada dalam taraf memprihatinkan. Maraknya perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, penyimpangan perilaku seksual pada sementara remaja dan pelajar, menunjukkan ancaman terhadap generasi muda di masa mendatang. Dalam masyarakat luas telah terjadi pula penyimpangan etika dan moral yang serius, seperti adanya budaya "mumpung", penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak cipta, pelecehan seksual, dan kecenderungan mudah terjadi tindak pembunuhan, menunjukkan semakin melunturnya nilai peradaban dan kemanusiaan. Kondisi merosotnya peradaban dan nilai kemanusiaan tersebut berakibat pula terhadap terjadinya disintegrasi internal, antar warga, kelompok, antara masyarakat dengan pemerintah, serta terciptanya citra buruk bangsa Indonesia di mata dunia.

Pembangunan manusia Indonesia yang mengarah pada penghargaan dan penanaman nilai-nilai budi pekerti, etika,

estetika dan moral perlu mengantisipasi berbagai ancaman lain, yakni ancaman yang datang dari luar sebagai akibat arus informasi dan komunikasi pada era global saat ini. Budaya global yang tidak mengenal batas wilayah geografis, agama, dan suku bangsa, membawa nilai-nilai baru melalui berbagai media.

Nilai-nilai budaya asing yang positif dapat didayagunakan sebagai nilai baru yang bermanfaat dalam pengembangan budaya nasional. Namun demikian masuknya nilai-nilai asing seringkali membawa serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan etika, moral dan budi pekerti bangsa Indonesia. Ada kecenderungan di kalangan remaja saat ini yang menerima dengan mudah seluruh nilai asing tersebut, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kecenderungan tersebut berakibat pada sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan nilai budaya bangsa, sekaligus sebagai ancaman terhadap upaya pembangunan kepribadian bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki jati diri dan akar budaya bangsa. Ini terjadi antara lain karena intensitas pengaruh budaya asing sangat kuat melalui berbagai media massa.

b. Kelemahan

Pendidikan etika, estetika, moral, dan budi pekerti saat ini belum dirumuskan dan diselenggarakan secara jelas, sistematis, dan berkesinambungan. Persepsi dari guru, orangtua, dan masyarakat terhadap nilai etika, estetika, budi pekerti masih terbatas dan beragam, sehingga sering terjadi kesalahpahaman pengertian dalam penyelenggaraan pengajaran. Keberagaman persepsi dan pemahaman tersebut terjadi pula sebagai dampak dari keberagaman suku bangsa di Indonesia yang sejak lama telah memiliki nilai etika, estetika, moral, dan budi pekerti yang tidak selalu sama antara satu suku bangsa dengan satu dengan yang lainnya. Keberagaman suku bangsa tersebut juga sering menyulitkan perumusan nilai-nilai nasional dalam rangka hubungan sosial lintas etnis.

Belum optimalnya pendidikan budi pekerti, etika, dan moral selama ini diakibatkan pula oleh lemahnya koordinasi dan sinergi kerja antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Di sisi lain telah terjadi gejala anomi di kalangan peserta didik, yakni peserta didik dihadapkan pada kesenjangan antara pengajaran nilai-nilai yang "baik" di sekolah dengan sikap dan perilaku masyarakat yang terjadi di luar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, saat ini belum ada konsistensi penerapan nilai etika, moral, dan budipekerti di sekolah, orang tua dan masyarakat.

Sumber dan bahan pengajaran budi pekerti, etika dan moral sebenarnya banyak ragam dan jenisnya, antara lain dari hasil inventarisasi, penelitian, penggalian, dan pengkajian budaya bangsa. Namun demikian bahan-bahan yang positif sebagai kekayaan berbagai suku bangsa yang telah dihasilkan belum didayagunakan sebagai pengajaran baik untuk pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Di sisi lain, selama ini belum dilakukan upaya yang optimal untuk mengkaji dan merumuskan nilai etika, etika dan moral yang datang dari luar yang berguna untuk memperkaya nilai-nilai bangsa dalam menghadapi pergaulan internasional.

c. Kekuatan

Kesadaran masyarakat terhadap pembangunan moral bangsa saat ini sangat kuat, bersamaan dengan maraknya tuntutan reformasi di segala bidang kehidupan. Berakhirnya pemerintahan orde baru mendorong kaum reformis untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar-dasar etika, moral, dan budi pekerti, HAM dan Demokrasi, serta keadilan.

Untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang berbudi pekerti dan bermoral, telah dikeluarkan berbagai kebijakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan. Kebijakan tersebut antara lain tertuang dalam salah satu pasal dalam UUSPN RI Nomor 2 tahun 1989 yang intinya mengamanatkan bahwa "tujuan pendidikan nasional, selain

untuk membentuk manusia Indonesia yang mampu menguasai IPTEK, dan terampil, juga membentuk manusia yang bermoral, berakhlak dan berbudi pekerti luhur". Dalam Undang-undang tersebut juga diamanat-kan bahwa "Kebudayaan Nasional adalah sebagai akar pendidikan nasional".

Di samping itu, dalam melaksanakan pendidikan etika, moral dan budi pekerti di seluruh wilayah nusantara, telah terdapat infrastruktur dan lembaga-lembaga pendidikan, didukung pula oleh tokoh-tokoh masyarakat. Di lingkungan sekolah telah dirintis pendidikan budi pekerti melalui pendekatan yang terintegrasi dengan mata pelajaran, program kurikulum muatan lokal, dan pengelolaan kerawanan sekolah.

Dari perspektif historis, sejak masa pengaruh kebudayaan Hindu, Budha, Islam, dan masuknya kebudayaan Barat, bangsa Indonesia telah terbukti mampu menyesuaikan diri dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif bagi kemajuan bangsa. Kemampuan tersebut dapat dijadikan modal dasar dalam menyesuaikan dan menyerap nilai-nilai positif terhadap pengaruh budaya global yang terjadi pada saat ini. Masyarakat yang religius sebagai kristalisasi dari sejarah panjang bangsa Indonesia juga merupakan kekuatan yang besar bagi perwujudan pembangunan moral bangsa Indonesia.

d. Peluang

Peluang yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia yang bermoral antara lain adalah tuntutan global yang menghendaki penerapan HAM, Demokrasi, dan keadilan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap dan perilaku yang bertentangan dengan etika dan moral akan mendapatkan "sangsi" dari bangsa lain yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Era reformasi bangsa Indonesia saat ini memberikan kondisi yang kondusif bagi pengembangan etika, estetika, moral, dan budi pekerti dengan cara yang lebih terbuka, dan kreatif.

2. Kebijakan

Pendidikan etika, estetika, moral, dan budi pekerti perlu diselenggarakan secara jelas dan terencana, sistematis, dan berkesinambungan sejak usia dini, melalui pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program kurikulum muatan lokal untuk SD dan SLTP dan perintisan pelaksanaan pendidikan budi pekerti di beberapa sekolah perlu terus disempurnakan dan diperluas di wilayah lain, dengan mempertimbangkan ketepatan metodologi, kesatuan persepsi terhadap makna budi pekerti di kalangan tenaga pengajar.

Pendidikan budi pekerti perlu dikembangkan pula melalui jalur luar sekolah dengan memanfaatkan lembaga-lembaga kesenian, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan peran orang tua. Agar pendidikan etika, estetika, moral dan budi pekerti mencapai sasaran yang diharapkan maka perlu ditingkatkan jalinan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, serta terciptanya persepsi dan pemahaman yang harmonis.

Sumber dan bahan pengajaran budi pekerti, etika dan moral hasil inventarisasi, penelitian, penggalian, dan pengkajian budaya bangsa, meliputi aspek kesenian daerah, bahasa dan sastra daerah, museum dan peninggalan sejarah purbakala, dan nilai-nilai tradisional lainnya, perlu didayagunakan sebagai sumber belajar dengan merekonstruksikan kembali menjadi buku-buku pelajaran/bacaan bagi siswa maupun masyarakat pada umumnya. Dalam rangka memperkaya nilai etika, moral dan budaya bangsa perlu upaya yang lebih optimal untuk mengkaji dan merumuskan nilai etika, estetika dan moral yang datang dari luar yang berguna untuk memperkaya nilai-nilai bangsa dalam menghadapi pergaulan internasional.

3. Program

a. Pembinaan Nilai

Perlu diselenggarakan kegiatan inventarisasi penelitian pengkajian dan pengembangan nilai-nilai estetika, etika dan moral yang bersumber dari beraneka suku bangsa di Indonesia. Pengkajian nilai global yang positif untuk pengembangan nilai-nilai etika, estetika, dan moral dan memadukannya dengan nilai budaya bangsa sehingga dapat dijadikan pedoman dasar bagi pengembangan sikap dan perilaku dalam pergaulan antar individu di arena nasional maupun global.

Dalam pengkajian nilai-nilai budaya bangsa dan budaya global lembaga-lembaga kebudayaan yang telah ada di daerah seperti Javanologi, Sundanologi, Batakologi dan lembaga asing (lembaga kebudayaan Perancis, Belanda dsb) perlu dilibatkan dan ditingkatkan peranannya sehingga seluruh kekayaan nilai etika estetika dan moral bangsa dan budaya bangsa lain dapat didayagunakan secara optimal. Pembudayaan nilai etika, estetika, dan moral perlu dikembangkan pula melalui tokoh keagamaan, tokoh masyarakat, lembaga sosial dan institusi kebudayaan lainnya dengan menjalin kerjasama yang sinergis dan terencana.

Pembudayaan nilai etika dan moral melalui sekolah perlu terus ditingkatkan baik melalui penyelenggaraan pendidikan budi pekerti yang dilakukan secara integral dalam berbagai mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan kesiswaan.

Secara khusus program kurikulum muatan lokal dapat lebih didayagunakan sebagai wahana pendidikan etika dan moral bagi siswa SD dan SLTP. Untuk itu, perlu dipersiapkan strategi, pedoman pembelajaran, dan peningkatan kemampuan guru secara sistematis dan terencana dalam pengembangan pendidikan estetika, etika, dan moral

b. Pembinaan Kesenian

Untuk mengembangkan kehalusan budi perlu diselenggarakan apresiasi kesenian di masyarakat maupun sekolah, dan meningkatkan pembelajaran kesenian dengan lebih bermutu, sejak usia pra sekolah, baik melalui media tradisional maupun modern.

Di lingkungan masyarakat perlu digalakkan apresiasi kesenian daerah bagi kaum muda secara variatif menyangkut seni teater, tari, suara dan kesenian, baik lokal maupun dari mancanegara (modern) agar tidak tercabut dari akar budaya dan dapat mengadopsi nilai-nilai kesenian yang positif dari bangsa lain. Untuk mewujudkan masyarakat yang apresiasitif terhadap kesenian, sanggar-sanggar kesenian perlu diberi fasilitas dan kesempatan untuk tampil pada momen-momen penting, dan secara berkesinambungan dilakukan festival kesenian di lingkup daerah dan nasional. Untuk itu, lembaga kebudayaan, balai budaya, dan para pembina kebudayaan perlu lebih kerja keras memberikan motivasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya seniman, dan kesenian daerah serta seni kontemporer.

Guna meningkatkan mutu tenaga pelatih dan pendidik di bidang kesenian perlu diselenggarakan program pelatihan kesenian, pembenahan terhadap LPTK di bidang kebudayaan dan kesenian, dan rekrutmen tenaga pembina sesuai dengan latar belakang pendidikan (kesenian).

c. Muskala

Pemberdayaan museum dan peninggalan sejarah dan purbakala perlu agar masyarakat, khususnya kaum muda dapat memahami nilai etika, estetika dan moral yang positif bagi pengembangan peradaban di masa mendatang. Museum milik pemerintah dan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah dapat memberikan berbagai peluang, fasilitas dan kemudahan bagi para peserta didik (sekolah) untuk melakukan apresiasi, studi, dan berbagai kegiatan. Untuk itu pihak permuseuman

perlu menyiapkan kehumasan, berbagai perangkat, dan kemampuan tenaga untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu.

d. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Melalui unit pembina ini dapat ditingkatkan kegiatan yang berfokus pada pengembangan nilai etika dan moral yang lebih dinamis bagi para penganutnya. Sumber-sumber nilai etika dan moral yang berasal dari berbagai aliran yang mencerminkan kehalusan budi, penahanan hawa nafsu, dan pembentukan manusia yang lebih beradab perlu diidentifikasi, diteliti, dikaji, dan didayagunakan bagi pergaulan sosial.

C. Persatuan Dan Kesatuan Bangsa (Integrasi Bangsa)

Nilai persatuan dan kesatuan bangsa perlu diperkuat dan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di masa depan sesuai dengan landasan awal dalam membentuk negara kesatuan RI. Keanekaragaman adat budaya, agama dan ras merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu ditumbuh-kembangkan dalam negara kesatuan RI dan selalu berupaya agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Hal ini terutama mengingat perkembangan terakhir dari kondisi yang ada, kerap muncul desakan-desakan disintegrasi dari pihak-pihak yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu.

1. Ancaman, Kekuatan dan Peluang, dan Kelemahan

a. Ancaman

Budaya global yang tidak selalu sesuai dengan ideologi bangsa merupakan ancaman bagi pembentukan manusia Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Budaya global masuk ke Indonesia melalui sains, teknologi, dan perdagangan bebas. Jika Indonesia tidak memiliki ketahanan budaya dalam menerima pengaruh budaya global dan perdagangan bebas, dikhawatirkan orang Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa.

Ancaman terhadap disintegrasi bangsa telah berada pada taraf yang mengkhawatirkan, ditandai dengan maraknya isu terhadap tuntutan negara federal, berbagai konflik dengan latar belakang SARA, dan tuntutan-tuntutan lain yang mengancam nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Kekuatan dan Peluang

Sejak tahun 1928, pemuda-pemuda dari berbagai golongan etnik dan agama di tanah air bertekad untuk bersatu dalam mewujudkan negara bangsa. Tekad ini ini dibuktikan pada tahun 1945 dengan berdirinya negara proklamasi yang bernama Republik Indonesia yang diperjuangkan dengan tetesan darah dan keringat. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah memberlakukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 masih terkendala dengan adanya ancaman pemerintah kolonial Belanda yang ingin menduduki kembali negeri jajahannya yang kemudian dapat diselesaikan secara diplomatis di meja perundingan pada tahun 1949.

Untuk memperoleh simpati dari negara-negara yang mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru memperoleh kedaulatan dari tangan Belanda, pada tahun 1950 Indonesia menerapkan demokrasi liberal di berbagai sektor kehidupan yang ditandai dengan multi partai dan pergantian kabinet dalam waktu singkat. Pada tahun 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang dilanjutkan dengan sidang-sidang konstituante sampai dengan tahun 1959. Karena konstituante tidak bisa menyelesaikan sidang-sidangnya pada waktu yang ditentukan, terutama masalah yang berkaitan dengan dasar negara, Soekarno atas desakan fihak militer mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 1 Juli 1959 yang menandai era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan kembalinya UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Pada tahun 1966 sampai dengan 1998 terjadi peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru yang misinya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen yang diikuti dengan larangan mempelajari ajaran Bung Karno mengenai Nasionalisme-Agama, dan Marxisme.

Pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang telah terjadi peristiwa penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan turunnya Soeharto, naiknya Habibie sebagai presiden, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki reformasi yang berkaitan dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), Dwifungsi ABRI, dan struktur kelembagaan di DPR/MPR. Sejak peristiwa 13-14 Mei 1998 di Universitas Trisakti dan peristiwa Semanggi 13 November 1998 menunjukkan bahwa gerakan-gerakan sosial yang terjadi dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yakni kelompok yang menghendaki perubahan dalam sistem sosial politik bangsa Indonesia dan lainnya kelompok yang berupaya mempertahankan status quo. Demonstrasi yang marak akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat di Indonesia sedang menghangat dan diperkirakan akan berlangsung lama sampai tuntutan mahasiswa dikabulkan oleh pemerintah.

Kekuatan bangsa Indonesia adalah keanekaragaman budaya kelompok etnik yang jumlahnya tidak kurang dari 500 buah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap kelompok etnik mempunyai latar geografis, sejarah, dan adat istiadat yang unik dan dapat dibanggakan sebagai suatu bangsa.

Suasana yang kondusif dalam era reformasi memberikan peluang yang mendorong kreativitas budaya di berbagai bidang kehidupan. Suasana tersebut perlu didukung dengan undang-undang agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

c. Kelemahan

Masih lemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan warga masyarakat lokal, utamanya dalam mengaktifkan simbol-simbol lokal di arena nasional (resmi), misalnya pemberian ucapan salam pembuka atau penutup menggunakan sumber acuan agama; penggunaan pakaian dan perhiasan yang mengacu pada kebudayaan asing atau daerah; penggunaan bahasa daerah atau asing yang belum disepakati secara nasional tetapi digunakan di arena resmi; semua itu menunjukkan bahwa masih belum ada kesepakatan dalam menafsirkan dan menggunakan simbol-simbol lokal dan nasional dalam konteks ruang dan waktu.

2. Kebijakan

Kebijakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara perlu diatur dalam undang-undang kebudayaan yang berisi antara lain tentang konsep penataan dan penggunaan ruang intim (*intimate distance*), ruang pribadi (*personal distance*), ruang sosial (*social distance*), dan ruang publik (*public distance*).

Dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, kebijakan yang dicanangkan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya bangsa dan sejarah bangsa Indonesia yang ditunjang dengan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang masalah integrasi bangsa.

Dialog antar golongan etnik dan kelompok sosial lainnya perlu direncanakan secara terarah dan sistematis agar tercapai persepsi yang positif terhadap perbedaan budaya dan terjadinya kesepakatan dalam mengaktifkan dan mendayagunakan simbol-simbol lokal di arena nasional (resmi).

3. Program

a. Pembinaan Nilai-nilai Budaya

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan pemahaman nilai-nilai budaya bangsa dan sejarah bangsa Indonesia yang ditunjang dengan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang masalah integrasi bangsa. Program ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan keanekaragaman budaya yang berguna dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program dialog antarbudaya yang diikuti oleh golongan etnik yang berbeda agar tercapai kesepakatan dalam penataan dan penggunaan ruang pribadi, ruang sosial, dan ruang publik.

Program otonomi daerah dan desentralisasi di bidang kebudayaan diupayakan melalui program pelestarian dan pengembangan kebudayaan di daerah-daerah dapat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pembinaan Bahasa dan sastra

Program penataan dan penggunaan istilah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Istilah lokal yang akan diangkat ke tingkat nasional hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

c. Pembinaan Muskala

Program museum sebagai tempat belajar dan wisata perlu digalakan dengan meningkatkan mutu layanan. Program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan melalui penulisan sejarah nasional dan peninggalan sejarah.

d. Kesenian

Program apresiasi seni di Indonesia perlu ditingkatkan, utamanya kesenian yang dapat memberikan kebanggaan terhadap kebudayaan bangsa. Kesenian yang dimaksud adalah semua jenis kesenian rakyat yang dekat dengan kehidupan masyarakat banyak.

e. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Program kerukunan hidup beragama (3R) hendaknya juga menampung kerukunan hidup diantara kelompok-kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuihan Yang maha Esa sebagai wujud pengakuan terhadap kebebasan memilih agama dan/atau kepercayaan.

f. Program Pendidikan

Program pendidikan masyarakat (luar sekolah) terpadu. Program ini melibatkan unsur-unsur dari instansi yang menangani masalah kebudayaan karena setiap upaya pendidikan yang di dalamnya memuat unsur-unsur kebudayaan juga menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan.

g. Program muatan lokal.

Program ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan di daerah-daerah. Penyelenggaraan pendidikan yang mengajarkan materi muatan lokal sebaiknya dimaksudkan ke dalam sistem pendidikan masyarakat terpadu (pendidikan dan kebudayaan). Materi muatan lokal meliputi unsur pendidikan agama, adat istiadat, dan sejarah lokal.

D. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani atau *civil society* merupakan bentuk kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan secara universal. Kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai berketuhanan/agama, toleransi/saling menghargai, keterbukaan, partisipasi dan

kemandirian, adalah suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar demokratis.

Dalam pasang surut sejarah perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia, upaya mewujudkan bentuk kehidupan bermasyarakat seperti ini, pada akhirnya selalu terdistorsi karena munculnya kepentingan-kepentingan sepihak dari kelompok atau golongan tertentu. Sebagai akibatnya nilai-nilai berketuhanan/ agama yang esensial bagi setiap manusia semakin teralienasi, toleransi dan saling menghargai sesama semakin sirna karena keadilan semakin jauh dari yang diharapkan, keterbukaan dan partisipasi dibungkam sehingga kemandirianpun tidak pernah menjadi kenyataan, dan puncaknya adalah bencana krisis kehidupan sebagaimana yang tengah melanda bangsa Indonesia sekarang ini.

Era reformasi yang telah lahir saat ini, kiranya dapat dijadikan tonggak untuk merevitalisasikan kembali nilai-nilai yang menjadi dasar untuk mewujudkan masyarakat madani, mengingat nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah tertanam dalam kebudayaan nasional.

1. Ancaman, Kekuatan, Kelemahan dan Peluang

a. Ancaman

- Karakteristik masyarakat madani secara diametrial bertentangan dengan pemerintahan militeristik yang berlangsung selama tiga dasawarsa. Euforia demokrasi yang bertumpang tindih dengan krisis yang terjadi saat ini dapat melahirkan situasi khaos dalam bidang politik. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan pihak militer mengambil alih kekuasaan politik dan akibat lanjut yang timbul adalah terjadinya militerisme yang menghambat berkembangnya masyarakat madani.

Ekonomi kapitalistik yang diterapkan selama ini pada taraf tertentu membawa serta berkembangnya pengaruh individualisme. Pengaruh ini mengurangi kerja sama horisontal antarwarga. Hal ini pada taraf tertentu menghambat proses berkembangnya masyarakat madani. Di lain pihak, berlanjutnya

ketergantungan ekonomi Indonesia pada hutang luar negeri mengakibatkan meningkatnya ketergantungan pemerintah pada kemauan negara/organisasi donor. Hal ini memperlemah upaya membangun kemandirian sebagai salah satu dasar terbentuknya masyarakat madani.

b. Kekuatan

Masyarakat madani sebenarnya merupakan bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan sejak diproklamasikannya negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat madani tersirat dengan jelas dalam kelima sila Pancasila sebagai dasar pendirian negara kesatuan Republik Indonesia, dan secara konseptual tercantum pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada bagian pembukaan. Hal tersebut menegaskan bahwa secara idiil dan konstitusional, bangsa Indonesia menjadikan terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk masyarakat madani sebagai tujuan didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja karena selalu terjadi penyelewengan oleh para penerima mandat kekuasaan dari rakyat, tujuan yang merupakan cita-cita luhur bangsa itu belum kunjung terwujud.

Komitmen bangsa yang tertuang dalam dasar negara dan UUD itu, diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa nilai-nilai yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat madani terdapat pula dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Meski dengan konfigurasi nilai yang bervariasi, dalam setiap kebudayaan suku bangsa yang ada di Indonesia, nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dengan jelas. Nilai religius atau kepercayaan kepada Tuhan/kekuatan pencipta dan pemelihara alam semesta selalu terdapat dalam budaya setiap suku bangsa di Indonesia. Demikian juga, dengan nilai-nilai keadilan/kesetaraan, keterbukaan, partisipasi dan kemandirian. Hal-hal tersebut jelas merupakan kekuatan dan modal dasar untuk menggalang kembali upaya mewujudkan bentuk masyarakat madani.

Disamping itu, tidak dapat dinafikan pula bahwa proses pembangunan yang dijalankan selama ini telah melahirkan generasi baru berupa kelompok intelektual, politisi, aktivis sosial dan seniman yang makin percaya diri dan tegas, yang mendukung universalitas nilai-nilai demokrasi. Hal inipun merupakan kekuatan tersendiri menuju pembentukan masyarakat madani.

c. Kelemahan

Selama kurun waktu Orde Baru ada kecenderungan pemerintah mengambil alih peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; pemerintah tak hanya bertindak sebagai manajer tapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Hal ini mengembangkan etatisme - penguasaan negara yang terlalu besar dalam berbagai sektor kehidupan warga masyarakat - yang mengakibatkan melemahnya peran warga masyarakat mengelola kehidupannya sendiri.

Dari sudut pandang lain, hubungan *patron - client* yang paternalistik menghambat hubungan kemitraan yang egaliter antara elit kepemimpinan dan warga masyarakat; kondisi ini memperlihatkan belum hilangnya ciri feodalisme, khususnya dapat dilihat pada kecenderungan pemecahan masalah dengan kekuatan sendiri masih bergantung pada pendapat dan keinginan orang yang lebih senior, berstatus, dan ditokohkan dalam masyarakat. Istilah yang biasa digunakan adalah pola anutan ke atas. Pola semacam ini dalam kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan dewasa ini dapat mengurangi semangat dan optimisme bahwa bangsa kita mampu memecahkan masalah dengan kekuatan sendiri.

Selain itu, gejala munculnya pertikaian ideologis yang didorong partai-partai yang baru terbentuk di era reformasi sekarang ini, mengakibatkan timbulnya pertentangan-pertentangan horisontal yang menghambat pembentukan masyarakat madani.

d. Peluang

Secara internal, era reformasi yang lahir sekarang ini memberikan peluang yang sangat besar untuk bersemi dan tumbuhnya kembali komitmen nasional untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar demokratis melalui pembentukan masyarakat madani. Secara eksternal era globalisasi yang ditandai pesatnya arus informasi melalui kemajuan berbagai sarana dan prasarana komunikasi, akan semakin mengurangi birokrasi *top - down*, mengakrabkan atasan dan bawahan serta meningkatkan hubungan egalitarian dan suasana yang lebih demokratis

Dengan kemajuan teknologi informasi, terjadi pemerataan informasi. Sehingga, informasi sebagai salah satu sumber kekuatan kekuasaan, tak hanya dimonopoli politisi, pemerintah, atau kaum bisnis. Kemajuan ini semakin mendorong terbentuknya masyarakat madani yang mampu menentukan nasib sendiri, demokratis, dan sanggup mengatur dirinya sendiri. Selain itu, arus keterbukaan dan demokratisasi yang dibawa gerakan reformasi mendorong rasa percaya diri dan kreativitas berbagai kelompok masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses keputusan politik dan ekonomi.

Peran partai politik, lembaga keagamaan, dan parlemen akan berkurang di masa depan. Sedangkan peran LSM, media massa, terutama TV dan internet, gerakan kelompok atau massa sebagai kelompok penekan (*pressure group*), dan organisasi profesi akan meningkat dalam proses pembentukan opini publik. Distribusi kekuasaan akan tersebar ke berbagai sentra atau agen. Keadaan ini semakin menunjang terbentuknya masyarakat madani. Dilain pihak, penyalahgunaan kekuasaan politik oleh diktator di penjuru dunia manapun, termasuk di Indonesia, akan ditentang oleh masyarakat global melalui aksi-aksi bersama sehingga mengurangi menguatnya dominasi pemerintah dan terbuka peluang percepatan terbentuknya masyarakat madani. Selain itu, kecenderungan memperkuat ekonomi kerakyatan (koperasi, usaha kecil dan menengah) yang menggejala dewasa ini akan

memperbesar jumlah wiraswasta di dasar piramida angkatan kerja yang memperkokoh fundasi masyarakat madani.

2. Kebijakan

Upaya mewujudkan masyarakat madani harus berakar dari tradisi dan kebudayaan bangsa sendiri yang sarat akan nilai-nilai berketuhanan/agama, toleransi/saling menghargai, partisipasi, keterbukaan dan kemandirian. Selanjutnya perkembangan masyarakat madani menuju wujudnya yang semakin mantap dan kokoh, membutuhkan pula tercipta dan terpeliharanya tatanan sosial dan politik yang stabil serta adanya sistem perekonomian yang kuat dan tangguh.

Dalam perspektif hubungan pusat dan daerah, peluang lebih besar perlu diberikan kepada daerah untuk memecahkan masalah sendiri secara kreatif sesuai dengan problem dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, sambil mengurangi kecenderungan meniru pemecahan masalah di pusat (Jakarta) atau di Jawa (sebagai daerah yang lebih maju). Otonomi daerah untuk mengurus diri sendiri akan menjadi titik tolak berkembangnya kreativitas untuk memecahkan masalah sendiri. Dalam rangka otonomi tersebut perlu lebih dititikberatkan manajemen pemerintahan dan lembaga legislatif di tingkat kabupaten (Kotamadya), sambil mengurangi kekuasaan di tingkat propinsi, kecamatan, dan desa.

Pemberian prioritas fasilitas kepada usaha besar dan konglomerasi sudah waktunya diimbangi dengan memberikan kesempatan lebih besar secara konsisten kepada koperasi, usaha kecil dan menengah untuk lebih berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi nasional. Melalui cara ini piramida ekonomi nasional akan lebih kukuh karena ditopang oleh lebih banyak warga masyarakat yang ikut menikmati pendapatan nasional melalui kesempatan atau peluang berusaha yang adil.

Di bidang pendidikan, otonomi lebih besar dalam berbagai bidang pendidikan perlu diberikan tidak hanya kepada daerah, tetapi

terutama kepada sekolah. Guna mengembangkan masyarakat madani, pendekatan belajar aktif dan kreatif serta pendekatan masalah perlu lebih ditekankan dalam kurikulum dan proses pembelajaran.

Dalam bidang kesenian, ciri-ciri masyarakat madani seperti swadaya, swadana, pemecahan masalah sendiri, dan interaksi egaliter, hendaknya lebih ditampilkan dalam pentas dan karya seni.

3. Program

a. Pembinaan nilai-nilai budaya

Penelitian tentang gagasan dan praktek budaya yang menunjang dan menghambat pembentukan dan berkembangnya masyarakat madani perlu dilakukan, dan hasil penelitiannya dimanfaatkan untuk mengem-bangkan masyarakat madani itu sendiri. Sebagai contoh, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dilakukan penelitian tentang proses akulturasi gagasan dan praktek sosial budaya antara masyarakat transmigran dan masyarakat penerima transmigran, yang hasil penelitiannya dimanfaatkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan transmigrasi.

Perlu pemberian peluang dan perhatian lebih besar kepada masyarakat lokal (komunitas) untuk memecahkan masalah sendiri tanpa mengan-dalkan bantuan pemerintah. Peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan secara bertahap dikurangi.

Dalam bidang politik kepada masyarakat perlu diberi kesempatan untuk ikut menentukan dalam proses pengambilan keputusan politik melalui partisipasi dalam kegiatan partai politik. Melalui cara ini pemerintah tetap dikontrol agar tidak mendominasi kehidupan publik secara berlebihan.

Sebagai salah satu representasi masyarakat yang penting, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibidang kebudayaan,

harus diberi ruang gerak lebih besar untuk bertumbuh dan mengembangkan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembina kebudayaan perlu memberikan peluang terhadap tumbuhnya nilai-nilai kemandirian dengan mengembangkan peran serta masyarakat.

b. Pembinaan Muskala

Pengembangan dan pemberdayaan museum dan peninggalan sejarah kepurbakalaan diarahkan pula untuk dapat memberikan pelukisan yang meyakinkan tentang kejayaan bangsa, berupa kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan mandiri, yang dulu pernah dicapai, dan sebagaimana kini dicita-citakan kembali dalam konsep masyarakat madani.

c. Pembinaan Kesenian

Ciri-ciri masyarakat madani hendaknya lebih ditampilkan dalam pentas dan karya seni. Sehingga apresiasi seni memasukan unsur-unsur nilai keagamaan, toleransi/kesetaraan, partisipasi, keterbukaan dan kemandirian dalam rangka pemahaman kewajiban manusia kepada Tuhan, kepada sesama dan alam, serta dalam memperoleh hak-haknya.

d. Program Pendidikan

Pemberian otonomi yang lebih besar dalam bidang pendidikan diwujudkan antara lain melalui penentuan sendiri atau pengambilan keputusan sendiri serta pemecahan masalah sendiri dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan terjangkau. Dalam kaitan dengan manajemen, manajemen berbasis sekolah (*School-Based Management*) perlu lebih dititikberatkan.

E. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek)

Dalam perkembangan global hingga saat ini, penguasaan Iptek dari suatu bangsa semakin menentukan kemampuan untuk beradaptasi dalam persaingan antar bangsa agar dapat tetap *survive* dalam kehidupan global. Kemajuan dan peradaban suatu bangsa ditentukan pula oleh sejauh mana bangsa tersebut mampu menguasai Iptek. Sementara ini bangsa Indonesia masih belum optimal dalam penguasaan Iptek, bahkan dalam beberapa hal masih ketinggalan di banding dengan bangsa-bangsa lain.

1. Ancaman, Kelemahan, Peluang dan Kekuatan

a. Ancaman

Sejalan dengan era globalisasi penguasaan ilmu dan teknologi mutlak diperlukan. Hanya melalui penguasaan Iptek itulah peradaban manusia dapat berkembang. Pada era globalisasi dimana sekat-sekat negara seolah sudah tidak ada lagi, Iptek memegang peranan yang cukup besar. Dalam persaingan secara global pemenang adalah mereka yang memiliki Iptek yang baik. Melalui teknologi transportasi dan informasi perubahan-perubahan sangat cepat terjadi. Kita dapat mengikuti berita langsung pada saat suatu kegiatan berlangsung, walaupun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Arus informasi yang merambat melalui udara terbuka sungguh sulit dibendung.

Persaingan global sejalan dengan era globalisasi telah sangat dirasakan. Bangsa-bangsa dengan Iptek yang tinggi dan baik akan menjadi pemenangnya. Masuknya Iptek dari suatu negara ke negara yang lain akan disertai dengan masuknya nilai-nilai budaya yang mendukungnya. Satu hal yang membahayakan berkaitan dengan ini adalah masuknya nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Berkaitan dengan itu semakin banyak kita mengadopsi Iptek dari bangsa lain untuk meningkatkan kehidupan masyarakat semakin banyak pula nilai-nilai asing yang masuk menyertainya. Sudah barang tentu bila hal ini berjalan terus akan mengancam budaya bangsa.

Secara ekonomis rendahnya penguasaan Iptek sangat terasa pengaruhnya. Perdagangan antarbangsa kini sudah semakin biasa. Melalui perdagangan ke luar negeri atau ekspor kita mendapatkan devisa. Dalam membangun bangsa dan negara devisa mempunyai arti yang sangat penting. Kita akan lebih leluasa membangun bila cadangan devisa kita banyak. Dalam hal itu banyak sedikitnya cadangan devisa sangat tergantung kualitas produksi yang kita miliki, sedangkan kualitas produksi sangat ditentukan oleh penguasaan Iptek yang dimiliki. Satu masalah muncul pada saat kita akan membangun tetapi cadangan devisa kita sedikit. Salah satu jalan keluar adalah terpaksa harus meminjam.

Masalah yang cukup serius berkaitan dengan peminjaman dana untuk pembangunan tersebut adalah juga turut sertanya berbagai macam nilai yang kemungkinan tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa sebagai akibat masuknya aliran modal tersebut. Sering pemberi modal juga memaksakan kehendaknya dalam ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam negeri, dengan alasan penyelamatan modalnya. Pada saat itulah kita kemudian menjadi tergantung oleh negara pemberi modal.

b. Kelemahan

Penguasaan Iptek sering tidak dapat dilepaskan dengan sejumlah nilai, sikap dan perilaku masyarakat. Dua hal yang sangat berpengaruh terhadap penguasaan Iptek adalah kebiasaan membaca dan cara berpikir ilmiah. Pengembangan Iptek itu sendiri pada dasarnya tidak terlepas dari cara berpikir ilmiah, yaitu cara berpikir secara obyektif, sistematis, dan metodik. Berbagai penelitian dan rancang bangun tidaklah dapat dilepaskan dari berpikir ilmiah. Sedangkan, membaca sangat penting artinya dalam transfer pengetahuan.

Suatu kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah masih rendahnya minat baca. Sejumlah perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan saat ini masih kurang diminati oleh masyarakat. Mahasiswa sendiri pun

sebagai kelompok masyarakat ilmiah menurut sejumlah penelitian juga masih belum banyak memanfaatkan perpustakaan, kecuali pada saat-saat akan menyusun skripsi ataupun tesis.

Pencarian kebenaran melalui cara berpikir ilmiah juga masih kurang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari munculnya banyak isu ataupun gosip yang belum tentu kebenarannya tetapi sudah begitu berkembang secara luas di masyarakat. Banyaknya tuntutan masyarakat terhadap berita yang dinilai tidak obyektif, terutama di surat kabar memberikan nuansa tersendiri masih lemahnya cara berpikir ilmiah di antara masyarakat.

Berbagai kenyataan tersebut di atas menjadikan hambatan tersendiri bagi berkembangnya Ilmu dan teknologi pada masyarakat kita.

c. Peluang

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh rakyat Indonesia selama ini memberi peluang untuk dapat mengakomodir masalah pengembangan penguasaan Iptek. Sarana dan fasilitas pendidikan sebagai media terselenggaranya transfer pengetahuan dan melatih menerapkan cara berpikir ilmiah sudah cukup tersedia. Hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara lain juga dapat dimanfaatkan bagi pengembangan Iptek.

Berkembangnya mass media baik cetak maupun elektronik juga memberikan peluang tersendiri terhadap kemungkinan pengembangan Iptek di Indonesia. Melalui surat-surat kabar masyarakat Indonesia dapat mengikuti berbagai macam pengetahuan maupun informasi yang berkembang. Banyak surat-surat kabar yang terbit saat ini secara rutin menampilkan artikel Iptek. Demikian juga halnya dengan media televisi, bagi pengembangan Iptek juga sangat memberi peluang. Bagi siswa-siswa sekolah, sebuah stasiun televisi khusus pada jam-jam tertentu menayangkan acara pendidikan.

d. Kekuatan

Kesadaran masyarakat Indonesia tentang arti pentingnya pendidikan saat ini telah cukup baik. Hal ini antara lain terlihat dari semakin kecilnya jumlah anak-anak usia sekolah yang tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Kesadaran orang tua ini juga didukung oleh program pemerintah melalui program wajib belajar. Uang sekolah yang relatif murah dan sarana pendidikan yang cukup mudah dijangkau oleh sebagian besar penduduk Indonesia, juga menjadikan kekuatan tersendiri

Kesadaran tentang arti pentingnya pendidikan juga terlihat dari semakin banyaknya orang-orang yang secara kesadaran diri meningkatkan pendidikan. Jenjang pendidikan Strata 2 dan Strata 3 kini sudah banyak diikuti oleh para sarjana Strata 1. Maraknya peningkatan pendidikan melalui program tersebut terlihat antara lain dari semakin banyaknya perguruan-perguruan tinggi yang membuka program pasca sarjana.

2. Kebijakan

Pengembangan penguasaan Iptek dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan ilmu-ilmu dasar, mendorong pendidikan keahlian ilmuwan terutama pada bidang-bidang yang langka, meningkatkan riset untuk penemuan teori Iptek, memperhatikan kesejahteraan ilmuwan dan peneliti, meningkatkan mutu dan kualitas sarana dan fasilitas pendidikan yang telah ada, meningkatkan kemampuan berbahasa asing para ilmuwan dan peneliti, menerjemahkan berbagai buku pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, dan memberikan penghargaan hasil karya/cipta, serta memasyarakatkan teknologi tepat guna .

Peningkatan mutu dan kualitas sarana dan fasilitas pendidikan dilakukan dengan cara antara lain menyempurnakan perpustakaan-perpustakaan sekolah dengan menambah koleksi buku serta menyediakan pustakawan bagi perpustakaan agar pelayanan perpustakaan lebih profesional, menyediakan laboratorium sebagai sarana praktikum bagi siswa-siswa di sekolah, dan meningkatkan

kemampuan guru melalui penataran-penataran baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan perbandingan pengajaran yang dilakukan.

Buku sebagai sumber pengetahuan dan informasi mempunyai peranan penting dalam peningkatan penguasaan Iptek. Satu masalah yang dihadapi adalah banyaknya buku-buku ilmiah yang masih berbahasa asing utamanya bahasa Inggris. Dengan menterjemahkan buku-buku berbahasa asing tersebut, akan mempermudah proses transfer pengetahuan yang didapat dari membaca buku.

Karya cipta merupakan hasil dari kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Melalui karya cipta itulah Iptek antara lain dapat dikembangkan. Dengan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah memunculkan buah karyanya, orang tersebut akan merasa dihargai dan oleh karenanya keinginan untuk mencipta dan berkarya dapat ditingkatkan.

Teknologi tepat guna ditingkatkan pemasarcatannya. Teknologi jenis ini sangat baik dikembangkan karena sesuai dengan potensi daerah di mana masyarakat yang bersangkutan berada. Peningkatan teknologi tepat guna tidak memerlukan modal yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya merupakan pengembangan teknologi yang biasanya telah sejak lama digeluti oleh masyarakat yang bersangkutan, didorong dan didukung oleh kalangan LSM, dalam kondisi perekonomian negara yang saat ini sedang kurang baik dirasa tepat dan bijaksana bila kita meningkatkan teknologi jenis ini.

3. Program

a. Pembinaan Nilai

Melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang menghambat maupun yang mendorong motivasi untuk gemar belajar, inovatif dan kreatif. Pengkajian

dilakukan pula terhadap nilai-nilai budaya dari manapun (asing) yang berguna bagi pengembangan Iptek. Pengkajian dan pendayagunaan teknologi tradisional yang sejak lama menjadi kekayaan bangsa seperti kedokteran tradisional, arsitektur tradisional, dan pengetahuan terhadap alam semesta lainnya, perlu diberdayakan baik melalui institusi sekolah maupun lembaga sosial lainnya.

b. Bahasa dan Sastra

Meningkatkan penerjemahan buku-buku asing (terutama bahasa Inggris, Jerman, Perancis dan Jepang) mutakhir menyangkut perkembangan Iptek dalam berbagai bidang ilmu, dan diperluas pemasyarakatannya baik mulai perguruan tinggi, sekolah, maupun perpustakaan.

c. Muskala

Melengkapi dan menyempurnakan benda-benda sejarah dan peninggalan purbakala yang erat kaitannya dengan teknologi tradisional dengan informasi yang memadai bagi pendidikan generasi muda. Hasil teknologi tradisional di bidang kebaharian, kedokteran, arsitektur dan teknologi "local genius" perlu ditampilkan melalui transkripsi maupun media modern yang memberikan penjelasan tentang makna, teknik, dan falsafah dari hasil budaya masa lalu, untuk didayagunakan dalam kehidupan masa kini.

d. Pendidikan

Peserta didik perlu ditingkatkan motivasinya agar lebih memiliki budaya membaca, meneliti, dan menulis tentang perkembangan Iptek dan menggali teknologi tradisional melalui berbagai sarana/media. Institusi sekolah dan lembaga terkait dapat meningkatkan perannya melalui lomba karya ilmiah, maupun penugasan-penugasan lainnya dalam hubungannya dengan Iptek.

Lembaga pembina kebudayaan perlu mendorong pelestarian dan pengembangan teknologi tradisional (termasuk teknologi tepat guna) untuk pemanfaatan bagi kemajuan masyarakat. Penghargaan perlu diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang terbukti mampu mengembangkan Iptek bagi kesejahteraan masyarakat, dan ikut berperan dalam melindungi hak karya cipta.

F. Etos Kerja

Pembangunan kebudayaan bangsa di masa depan perlu mencanangkan elemen etos kerja sebagai bagian penting dalam mengembangkan manusia Indonesia yang disiplin, produktif, inovatif, profesional, gemar belajar, dan menghargai karya orang lain. Sementara ini, sedikit banyak karena pengaruh budaya feodal, nilai-nilai etos kerja bangsa Indonesia dinilai masih lemah, sehingga perlu terus diberdayakan dan dibudayakan melalui berbagai cara sesuai tuntutan yang ada.

1. Ancaman, Kelemahan, Peluang dan Kekuatan

a. Ancaman

Pada era globalisasi yang saat ini sedang menggejala, masyarakat Indonesia dihadapkan oleh persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain. Bila kita tidak dapat memenangkan persaingan ini, kemajuan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya kita akan terhalang oleh bangsa lain. Untuk itu, perlu dipersiapkan sumber daya manusia dengan etos kerja yang baik. Etos kerja dapat diartikan sebagai adanya orientasi nilai yang memberikan semangat pada diri seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik. SDM dengan etos kerja yang baik akan mempertinggi pula produktifitas kerja, yang pada akhirnya akan mampu bersaing dengan bangsa lain.

Penjajahan dalam bentuk baru mungkin akan kita alami bila kita menjadi bangsa yang kalah dalam persaingan global dengan bangsa lain. Kedaulatan kita sebagai bangsa akan terancam bila hal ini tidak kita cermati. Hal ini akan sangat bertentangan

dengan cita-cita bangsa yang menghendaki terwujudnya kedaulatan bangsa di negara Indonesia. Kesejahteraan masyarakat juga mempunyai kaitan erat dengan etos kerja. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa bangsa yang tingkat kesejahteraannya baik, mempunyai etos kerja yang baik pula.

b. Kelemahan

Beberapa kalangan menganggap bahwa etos kerja masyarakat Indonesia masih lemah. Apakah pendapat ini terpengaruh oleh pandangan bangsa Belanda yang menjajah kita tempo dulu yang tercermin dari ungkapan-ungkapannya bahwa bangsa Indonesia yang oleh mereka disebut sebagai "*Inlander*" memiliki disiplin yang rendah, kurang tekun, dan malas bekerja. Ataupun ada perbedaan nilai budaya tentang kerja antara kita dengan bangsa Belanda yang menjajah pada saat itu. Akan tetapi, satu hal yang menarik untuk disimak adalah gejala yang muncul pada saat ini yaitu adanya kesenjangan ekonomi yang cukup tajam antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain diantara masyarakat Indonesia. Secara sederhana hal ini dapat dijelaskan karena masih tidak seimbangya tingkat etos kerja yang dimiliki.

Sejumlah nilai budaya yang terdapat pada beberapa kebudayaan suku bangsa kurang mendukung etos kerja secara positif. "*Ono dino ono upo*" sebagai nilai budaya Jawa yang berkonotasi mencari makan itu tidak perlu ngoyo, dapat memperlemah semangat kerja seseorang. Begitu pula upaya kerja yang bersifat *subsistence* pada beberapa kelompok masyarakat di Indonesia juga akan mempengaruhi kesinambungan semangat kerja yang ada. Setelah panen misalnya seseorang akan bersantai memanfaatkan hasil pertaniannya, sambil menunggu kegiatan pertanian berikutnya.

c. Peluang

Masyarakat Indonesia kini telah mulai sadar akan pentingnya mengubah berbagai kebiasaan lama yang kurang menguntungkan. Sudah barang tentu ini disebabkan karena

pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan seperti kesulitan mencari kerja karena lapangan kerja yang terbatas. Persaingan yang semakin ketat dalam berbagai segi kehidupan masyarakat menyebabkan seseorang harus lebih keras lagi bekerja dan berusaha. Sejumlah nilai budaya tradisional yang kurang mendukung etos kerja juga sudah mulai ditinggalkan. "Makan nggak makan asal ngumpul" kini juga sudah tidak populer lagi dibicarakan. Banyak orang Jawa yang sudah meninggalkan nilai tersebut, dengan ikut transmigrasi sebagai wujudnya.

Berbagai fasilitas dan sarana yang ada pada saat ini dapat mengakomodasi peningkatan etos kerja masyarakat. Begitu pula berbagai massa media baik cetak maupun elektronika dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi meningkatnya etos kerja masyarakat. Tayangan televisi yang memperlihatkan berbagai kondisi dan keberhasilan pada suatu kelompok masyarakat tertentu, dapat menjadi pendorong seseorang untuk meningkatkan semangat kerja. Begitu pula berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkemas dalam media cetak juga dapat merangsang tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan kreativitas masyarakat yang penting sekali artinya bagi peningkatan etos kerja.

d. Kekuatan

Kesadaran masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan menjadi kekuatan bagi peningkatan etos kerja. Kekuatan yang bersifat naluriah ini akan tumbuh subur bila disertai dengan suasana yang kondusif, yang berupa berbagai peluang yang mendukung. Adanya motivasi dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah sangat bermanfaat untuk menambah kekuatan masyarakat dalam meningkatkan etos kerja yang dimiliki.

Ajaran agama tentang kerja sebagai bagian dari ibadah menjadi kekuatan tersendiri dalam mendorong semangat kerja. Melalui hal ini seseorang dimotivasi bahwa bekerja bukan hanya semata-mata untuk dapat memenuhi hidup dan kehidupannya sendiri. Tetapi, seseorang berkerja adalah atas perintah Tuhan. Satu hal

yang cukup positif berkaitan dengan pengertian kerja sebagai ibadah adalah manfaat bagi orang lain. Karena, pada hakekatnya bekerja juga akan mempunyai manfaat terhadap orang lain.

2. Kebijakan

Etos kerja yang baik sesuai dengan tuntutan zaman pada saat ini perlu dimasyarakatkan sejak dini melalui jalur sekolah ataupun masyarakat luas. Hal ini penting bagi peningkatan produktivitas kerja dalam rangka persaingan yang semakin ketat dan keras. Disamping untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan, persaingan juga dapat meningkatkan kualitas kerja yang pada akhirnya dapat memenangkan persaingan global yang saat ini melanda hampir di seluruh bangsa-bangsa di dunia.

Penumbuhan semangat kerja, bekerja dengan menggunakan logika dan rasionalitas sesuai dengan kondisi kerja merupakan hal yang penting untuk dimasyarakatkan. Melalui jalur sekolah dilakukan dengan memberikan muatan lokal sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Mengajarkan bagaimana bertani yang baik dan benar termasuk dalam pemberian bahan-bahan perangsang tumbuh, pemberantasan hama serta pemeliharaan dan penanganan pemungutan hasil misalnya diberikan pada siswa-siswa yang lingkungan tempat tinggalnya adalah daerah pertanian. Begitu pula halnya dengan siswa-siswa yang lingkungannya perairan ataupun perladangan.

Pemberian motivasi oleh para guru di kelas kepada siswa-siswa tentang bagaimana pentingnya peningkatan etos kerja bagi masa depan siswa kelak dikemudian hari akan memberi dorongan tersendiri. Untuk itu, perlu diadakan semacam buku panduan bagi para pendidik untuk dapat menyampaikan arahan-arahnya sesuai dengan maksud di atas. Buku panduan itu antara lain berisi tentang bagaimana sulitnya hidup saat ini, bagaimana kita harus mengantisipasi keadaan ini, dan peluang-peluang apa yang dapat dilakukan sejalan dengan keadaan seperti sekarang ini.

Bahan bacaan tentang etos kerja sebagai tambahan wawasan bagi siswa-siswa di sekolah perlu diberikan. Melalui bacaan ini siswa dapat menambah wawasan pengetahuannya terutama yang berkaitan tentang bagaimana mereka harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan perkembangan zaman. Disamping itu, buku bacaan juga dapat digunakan untuk meningkatkan minat baca siswa-siswa sekolah. Secara tidak langsung meningkatnya minat baca juga akan mempengaruhi etos kerja mereka.

Melalui jalur luar sekolah, yaitu masyarakat luas, penyadaran tentang arti pentingnya peningkatan etos kerja juga dilakukan. Sebagai bagian terbesar masyarakat, kelompok ini merupakan sasaran yang potensial sekali. Sebagai kelompok terbesar mereka akan banyak mempengaruhi kondisi bangsa ini berkaitan dengan produktivitas kerja yang dimilikinya. Penyadaran pentingnya peningkatan etos kerja pada masyarakat luas dilakukan antara lain melalui berbagai penyuluhan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan melalui ceramah, tatap muka dengan mengumpulkan warga masyarakat yang menjadi sasaran, ataupun secara tidak langsung seperti penyebaran leaflet, tayangan televisi, ataupun penyiaran radio.

3. Program

a. Pengembangan Nilai Budaya

Nilai etos kerja yang positif yang terkandung dalam ajaran, ungkapan, adat istiadat suku bangsa, dan nilai-nilai keagamaan, seperti kerja keras, menghargai karya orang lain, produktif, profesional, gemar belajar, bersaing dengan sehat, dan disiplin, perlu dikaji dengan mengadakan kegiatan inventarisasi dan penelitian, serta didayagunakan bagi pembentukan manusia Indonesia yang lebih baik. Sebaliknya, nilai-nilai yang bertentangan dengan etos kerja perlu dieliminir. Pengembangan nilai etos kerja bangsa dilakukan pula dengan mengkaji dan mengadopsi nilai-nilai dari bangsa-bangsa lain, baik dari bangsa Asia, Eropa, maupun Amerika yang telah terbukti bermanfaat bagi kemajuan dalam kehidupan global.

b. Muskala

Pengembangan dan pemberdayaan museum dan peninggalan sejarah kepurbakalaan diarahkan pula untuk dapat memberikan pelukisan yang meyakinkan tentang semangat bekerja keras, keberanian, disiplin, dan kehebatan bangsa di masa yang lalu agar generasi muda dapat mengambil nilai etos kerja yang positif.

c. Pendidikan

Pembudayaan nilai etos kerja perlu lebih ditingkatkan pelaksanaannya baik melalui jalur sekolah, luar sekolah, maupun melalui pembina kebudayaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Di lingkungan sekolah, kegiatannya diprogramkan secara integratif dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Di tingkat SD dan SLTP pembudayaan etos kerja dikembangkan lewat program kurikulum muatan lokal, dengan mendayagunakan nilai etos kerja lokal yang positif dalam kesatuan program muatan lokal yang telah dicanangkan.

Program pembinaan kesiswaan dilaksanakan dengan memperhatikan kegiatan yang membentuk etos kerja peserta didik, antara lain peningkatan kedisiplinan siswa, kewirausahaan, dan pelaksanaan program 6 K (Ketertiban, keamanan, keindahan, dsb) dalam lingkup wawasan wiyata mandala, yakni sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan.

G. Bahasa Dan Sastra

Penguasaan bahasa Indonesia mutlak diperlukan dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan bahasa Indonesia dalam arti menggunakan bahasa Indonesia sesuai standar berbahasa Indonesia yang baik dan benar, harus dimulai dari percakapan sehari-hari hingga ke pertemuan-pertemuan atau forum-forum resmi.

Penghayatan karya sastra tidak hanya ditekankan pada pemahaman konsep kesastraan, tetapi yang lebih penting memahami nilai-nilai yang dipesankan oleh suatu karya sastra. Kesastraan yang merupakan wujud buah karya dan karsa yang dapat menjadi identitas kebudayaan bangsa Indonesia, di dalamnya tidak saja mengandung ajaran moral tetapi juga sikap hidup yang sesuai dengan nilai budaya bangsa.

1. Ancaman, Kekuatan, Kelemahan dan Peluang

a. Ancaman

Kenyataan hingga saat ini menunjukkan penguasaan bahasa Indonesia masih belum memadai. Keadaan tersebut, dengan intensitas yang berbeda, terjadi disemua tingkat mulai percakapan sehari-hari sampai ke forum-forum resmi. Hal ini merupakan ancaman bagi upaya pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi dan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa resmi internasional yang paling luas digunakan diberbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan, penguasaannya dikalangan masyarakat pada umumnya dan peserta didik diberbagai jenis, jenjang dan jalur masih tergolong rendah. Jika keadaan ini terus terjadi, maka mutu sumber daya manusia Indonesia akan terus tertinggal dalam persaingan global.

Kemajuan teknologi informasi yang berdampak pada meningkat pesatnya aliran arus informasi dari luar negeri, salah satunya menyebabkan karya-karya sastra asing dalam berbagai bentuk dan jenis sangat mudah masuk dan menyebar dikalangan masyarakat luas. Hasil karya sastra asing yang umumnya sangat terkesan kreatif dan inovatif itu, pada kenyataannya dalam banyak hal sangat disukai terutama oleh kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini jelas dapat mengancam karya sastra lokal, karena generasi muda pencinta sastra lebih menggemari karya sastra asing daripada sastra lokal.

b. Kekuatan

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia sudah hampir merata di seluruh Indonesia. Terlebih lagi dengan dampak positif kemajuan teknologi informasi, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi telah menjangkau hampir semua pelosok tanah air. Hal ini selain merupakan kekuatan dalam rangka menjadikannya benar-benar sebagai identitas bangsa, juga akan semakin mengukuhkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya tentu sangat diharapkan dapat menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan sangat potensial untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keanekaragaman suku bangsa dengan adat istiadatnya masing-masing merupakan kekuatan pula untuk pengembangan kesastraan. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki berbagai karya sastra yang mengandung nilai-nilai ajaran moral dan sikap hidup yang positif. Dalam perkembangannya hingga kini, masih banyak karya-karya sastra tersebut yang belum terdata dengan baik, terpublikasi dan terapresiasi secara luas di tengah masyarakat.

c. Kelemahan

Perilaku warga masyarakat yang kurang mengindahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sains dan teknologi dan tidak menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Minat baca warga masyarakat di bidang sastra masih rendah. Padahal kita mengetahui bahwa karya sastra berisi pesan-pesan kultural yang dapat memperkaya dan memperkembangkan budaya bangsa.

d. Peluang

Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan berbahasa asing tertentu, seperti orang Timor-Timur menguasai bahasa Portugis, dan orang Tionghoa menguasai bahasa Mandarin. Pada skala lebih kecil ada warga bangsa yang menguasai bahasa asing lain seperti bahasa Rusia, Perancis, Jerman, dan Jepang. Perlu diberi dorongan dengan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan warga negara yang menguasai bahasa asing tertentu, seperti bahasa Portugis, Mandarin, Rusia, Perancis, Jerman dan Jepang. Kemampuan ini perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk pemanfaatan bagi pengembangan Iptek dan budaya.

Peminat karya sastra Indonesia menunggu karya sastra yang bermutu, utamanya karya sastra yang memuat ajaran moral dan pandangan hidup yang digali dari khasanah budaya nusantara.

2. Kebijakan

Pembinaan bahasa Indonesia terus ditingkatkan untuk mempertinggi mutu pemakaian dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Selain itu juga memperluas penerapan serta penggunaannya sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan dilakukan pula melalui upaya penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa serta pemekaran perbendaharaan bahasa dengan didukung oleh sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan yang memadai. Dengan demikian bahasa Indonesia akan lebih mantap dan luwes serta mampu sebagai sarana pengungkap cipta, rasa dan karsa serta sebagai sarana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan jati diri dan kepribadian bangsa, serta mempertinggi kebanggaan nasional. Disamping itu, pembinaan bahasa-bahasa daerah juga terus dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pemakaian dan memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia.

Pembinaan dan pengembangan kesastraan sebagai ungkapan budaya bangsa diupayakan mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta, memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan apresiasi dan kreativitas, memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati karya sastra serta memberikan inspirasi dan gairah membangun. Karya-karya sastra yang terdapat diberbagai daerah dan suku bangsa perlu terus digali, didukung oleh iklim, sarana dan prasarana yang memadai, yang menunjang proses penciptaan dan pemanfaatan teknologi serta penelitian dan perlindungan hak cipta. Pengiriman misi-misi kesenian dalam rangka diplomasi kebudayaan dan komunikasi antar bangsa juga perlu terus ditingkatkan.

3. Program

Pembinaan bahasa dan kesastraan dilakukan dengan menggairahkan pengajaran bahasa dan mendorong sikap gemar membaca. Untuk mendukung hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan penerbitan buku dan penerjemahan buku-buku asing yang dapat meningkatkan kecerdasan dan daya nalar bangsa Indonesia. Perpustakaan sebagai sarana pendukung kegiatan gemar membaca terus ditingkatkan peranannya antara lain dengan pembentukan Taman Bacaan Masyarakat.

Pengajaran bahasa Indonesia tidak hanya diperuntukkan bagi peningkatan kemampuan berbahasa secara baik dan benar, tetapi juga dikembangkan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemampuan menguasai, menerjemahkan, dan menggunakan bahasa asing perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan meingkatnya intensitas kontak budaya antar bangsa.

Pembinaan kebahasaan dilakukan dengan pembakuan dan penyempurnaan tata bahasa dan khasanah bahasa Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, sosialisasi bahasa Indonesia kepada masyarakat Indonesia dengan menerbitkan buku-buku ilmu pengetahuan dan sastra ke seluruh Indonesia.

Dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu disusun suatu kamus bahasa Indonesia yang memuat peristilahan yang sering digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerbitan kamus-kamus istilah tersebut dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan.

Penulisan dan penerjemahan karya ilmiah dan karya sastra, termasuk bacaan anak yang berakar pada budaya bangsa dan memberikan inspirasi bagi pembangunan budaya nasional perlu digalakkan untuk memperkaya bahasa dan kesusastraan serta pustaka Indonesia.

Pembinaan kesastraan sebagai ungkapan budaya bangsa terus ditingkatkan agar mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta, melalui pemberian pengharagaan, pembinaan organisasi kesenian, peningkatan apresiasi dan kreativitas seni di masyarakat serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

Kesastraan daerah perlu terus dipelihara dan dikembangkan untuk meningkatkan wawasan Bhineka Tunggal Ika, untuk itu perlu didukung oleh iklim yang kondusif bagi berkembangnya kesastraan nasional dan daerah.

Dalam upaya untuk mengembangkan sastra dan seni perlu memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga misinya dapat dihayati oleh seluruh anggota masyarakat secara luas serta dapat terjadi pengayaan antara suku bangsa sebagai hasil interaksi aktif antar suku bangsa yang ada di Indonesia.

Pembinaan kesastraan dilakukan melalui pemetaan kesastraan daerah dan mengangkat sastra daerah yang menonjol menjadi salah satu sastra nusantara. Pembinaan kesastraan juga dilakukan dengan meningkatkan penerbitan majalah-majalah sastra yang dapat menjangkau anggota masyarakat di daerah-daerah.

H. Kesehatan Dan Olah Raga

Manusia yang disebut sehat seutuhnya bukan hanya sehat jasmaninya saja, tetapi juga sehat rohaninya. Sehat jasmani dan rohani merupakan modal utama untuk menjadi SDM yang berkualitas, sebagaimana mutlak dibutuhkan untuk memasuki era globalisasi. Salah satu cara untuk meningkatkan, minimal menjaga kesehatan, adalah dengan menggalakkan kegiatan olah raga agar masyarakat gemar berolah raga untuk menjaga kebugaran tubuh serta kesehatan jasmani dan rohani. Dalam hal ini penggalakan kegiatan olah raga juga tidak semata-mata untuk meningkatkan prestasi yang dapat meningkatkan prestise bangsa, tetapi secara luas yang lebih penting adalah membentuk manusia-manusia yang sehat seutuhnya.

Olah raga memiliki kaidah yang harus ditaati pelakunya serta sikap-sikap batin yang menjiwai pelakunya. Di dalam permainan olah raga terdapat hal-hal positif yang mendasari prestasi seperti ambisi (dalam arti baik), ketekunan dalam berlatih, ketangguhan dalam berkompetisi, sikap-sikap menghormati lawan dan kawan serta aturan permainan merupakan suatu kondisi dasar yang dapat mempengaruhi penampilan baik di lapangan maupun dalam hidup bermasyarakat sebagai pendukung kehidupan.

1. Ancaman, Kekuatan, Kelemahan dan Peluang

a. Ancaman

Terpuruknya keadaan di tanah air saat ini merambah hampir ke segala segi kehidupan, dan tentu saja berdampak dalam sendi-sendi penyangga kehidupan bangsa antara lain pada bidang kesehatan dan olahraga. Tidak sehatnya jasmani dapat langsung teramati dan terukur tetapi kesehatan rohani lebih sulit pendeteksiannya, namun ada cara-cara tidak langsung yang merupakan sasmita adanya kelainan atau ketidak sehatan rohani. Gejala ketidak sehatan rohani yang nampaknya relatif kecil jika disandang oleh manusia sebagai individu, akan menjadi suatu dampak negatif yang sangat besar apabila disandang oleh kelompok manusia atau sekelompok anggota suatu masyarakat.

Gejala-gejala tersebut muncul dalam berbagai bentuk perilaku negatif, seperti kurang toleransi, kecurigaan antar kelompok, keirihatian atas keberuntungan orang atau kelompok lain, ketidak sportifan, misalnya tidak mau mengakui keunggulan kelompok lain, suka memfitnah, berburuk sangka dan sebagainya. Sebagai dampaknya timbul berbagai tindak destruktif sebagaimana sering terjadi belakangan ini. Apalagi berbarengan dengan terpuruknya keadaan ekonomi dan moneter semakin memudahkan meletupnya gejala-gejala tersebut karena beratnya tindihan beban yang harus dipikul.

Krisis ekonomi dan moneter juga membuat kemampuan daya beli rakyat rendah, sehingga untuk memenuhi empat sehat saja sulit apalagi lima sempurna. Hal itu berarti makin menurunkan daya tahan tubuh, yang akan nampak dalam stamina yang rendah dalam berbagai aktifitas yang dilakukan. Selanjutnya keadaan ini akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan berupa penyakit. Sebagai alternatif pengobatan, karena tentu harga-harga obat resmi juga menjadi semakin tak terjangkau, memang terdapat berbagai jenis obat atau jamu-jamu tradisional. Namun kenyataan hingga saat ini banyak potensi obat-obatan tradisional tersebut yang belum diteliti. Beberapa kenyataan yang terjadi bahkan orang-orang dari bangsa lain yang lebih aktif melakukan penelitian dibidang ini.

b. Kekuatan

Antara kesehatan dan olahraga ada hubungan timbal balik, artinya kesehatan itu menunjang kegiatan olahraga, kesehatan merupakan salah satu syarat untuk bisa berpartisipasi baik dan kesehatan yang baik menjanjikan salah satu tumpuan untuk berprestasi. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan macamnya variasi makanan yang harus dikonsumsi. Meskipun bahan sayuran tak terjangkau namun jamu-jamuan yang ramuannya terdiri dari tanaman yang berhasiat untuk kesegaran jasmani dapat berfungsi sebagai substitusi. Perdagangan jamu-jamuan tradisional kini makin marak dan jenisnya pun makin banyak, hal itu nampak dengan munculnya banyak industri jamu tradisional yang paling tidak segi kebersihannya lebih terjamin.

Melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh lembaga yang berwenang mengelola keolahragaan, terdapat berbagai jenis dan macam olah raga tradisional yang potensial untuk dikembangkan. Diharapkan jenis-jenis olah raga, yang diantaranya seni bela diri tradisional, dapat lebih digiatkan, ditingkatkan animonya dengan lebih terarah dan menyebar, sehingga akan menjadi milik seluruh anggota masyarakat.

c. Kelemahan

Kebutuhan gizi makin sukar dicukupi, terutama sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter dewasa ini. Sementara dikalangan masyarakat awam yang banyak jumlahnya, belum mengerti apa arti makanan sehat/bergizi. Dengan sendirinya kesehatan makin sukar dipertahankan, karena daya tahan tubuh yang semakin rendah. Dilain pihak, mahalnya obat-obatan juga menjadi salah satu *frame factors*. Jamu-jamuan tradisional, yang dibuat sendiri oleh masyarakat dan sering dianggap sebagai pilihan lain dari obat modern, sering sulit untuk dipertanggung jawabkan karena produksinya belum melalui penelitian dan uji coba sebagaimana persyaratan sebelum obat diproduksi dan dimasyarakatkan. Karena, belum ada penelitian maka ini mengakibatkan tidak jelasnya dosis, tidak jelasnya khasiat unsur-unsur ramuannya dan paling parah apabila proses pembuatannya tidak bersih.

Tidak mencukupinya fasilitas olah raga termasuk unit-unit kesegaran jasmani yang menunjang olah raga dan kesehatan. Ketidacukupan fasilitas tadi diperparah dengan sempitnya ruang gerak untuk olah raga, misal tidak dibangunnya jalur sepeda, bahkan trotoar pun tidak memberikan keleluasaan berlari pagi.

d. Peluang

Tujuan pemerintah untuk menanami lahan tidur dan juga halaman rumah yang kosong merupakan pendorong untuk berswasembada empat sehat, dan apabila juga diselingi dengan tanaman yang mengandung khasiat pengobatan maka itu

merupakan langkah positif yang perlu didukung. Mengonsumsi sayur-sayuran dan jamu-jamuan dapat merupakan upaya preventif dalam memelihara kesehatan.

Adanya kegiatan Direktorat Kepemudaan dan Olah Raga yang mengidentifikasi dan menginventarisasi olah raga, dalam hal ini pencak silat, memberikan harapan pengembangan. Pencak silat ini dapat dilakukan sendiri sebagai latihan pribadi dan hanya memberikan kemahiran bela diri sekaligus merupakan latihan (*physical exercise*) yang merupakan kegiatan kesegaran jasmani, itu berarti menunjang kesehatan. Kesegaran jasmani ini mampu melepaskan beban-beban emosional sehingga mengurangi kecenderungan-kecenderungan tidak sehat. Hal itu dapat mengkondisikan kebeningan berpikir. Apalagi kalau pelatihan itu dilakukan dalam kelompok akan terjadilah proses sosialisasi.

2. Kebijakan

Kesehatan dan olahraga merupakan suatu kesatuan timbal balik artinya kesehatan menunjang kegiatan olahraga dan olahraga memberikan dampak kesehatan apabila dilakukan dengan benar dan ditopang makanan bergizi. Untuk itu, berbagai upaya yang bertujuan menggalakan kegiatan berolah raga seluas-luasnya kepada masyarakat perlu terus dilakukan. Beberapa diantaranya yang mendasar adalah menyediakan ruang-ruang berolah raga terutama di sekitar lingkungan pemukiman, mengadakan sarana dan prasarana yang memadai, mengadakan kegiatan-kegiatan atau acara olah raga bersama (masal) baik dengan tuntutan prestasi maupun sekedar rekreasi.

Seiring dengan upaya-upaya tersebut di atas, usaha-usaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk hidup bersih dan sehat, termasuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup, perlu terus digalakkan. Dalam hal ini, usaha-usaha tersebut dapat dilakukan baik melalui jalur formal (sekolah) maupun jalur informal.

Bantuan-bantuan, terutama langsung berupa materi, kepada kelompok masyarakat yang rawan gizi harus pula dilakukan.

Dengan kondisi krisis ekonomi dan moneter seperti sekarang ini, kelompok masyarakat ini menjadi kelompok yang sangat peka terhadap serangan berbagai penyakit, padahal dari segi jumlahnya, kelompok masyarakat ini merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia.

3. Program

Pengadaan kegiatan-kegiatan latihan jasmani (*physical exercise*) dengan menyediakan fasilitas olah raga (*gym*) yang memadai di sekolah-sekolah. Selanjutnya diupayakan pula kesempatan baik berupa tempat dan waktu untuk kegiatan-kegiatan latihan jasmani di luar sekolah, terutama daerah pemukiman. Kegiatan-kegiatan yang juga sangat mendukung olah raga dan kesehatan, antara lain dengan pelatihan (*coaching*), perlombaan dan *school garden*, terus diupayakan secara lebih luas dan mendalam.

Melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis olah raga tradisional, dan menindak lanjutinya dengan menyebar luaskan kepada masyarakat luas agar masyarakat merasa ikut memiliki untuk kemudian semakin meningkatkan kegemaran berolah raga. Tahap selanjutnya mengadakan berbagai kesempatan melakukan kegiatan olah raga bersama (*massal*), baik yang menuntut prestasi (*kompetisi*) maupun sekedar rekreasi.

Mengadakan kegiatan-kegiatan penyadaran hidup sehat pada masyarakat luas dengan memanfaatkan berbagai media seperti radio, televisi, surat kabar dan dengan menggunakan sarana prasarana yang ada dengan lebih intensif lagi. Bentuk kegiatan berupa penyuluhan di sekolah, pemukiman, tempat-tempat usaha dan lain-lain. Selain itu, upaya inventarisasi, penelitian dan pengembangan obat-obatan tradisional terus semakin digalakkan untuk mendapatkan berbagai obat-batan yang tepat guna dan terjangkau masyarakat luas. Dalam hal ini, untuk jenis dan tujuan pengobatan tertentu diupayakan masyarakat dapat memproduksinya sendiri secara baik dan benar.

BAB III PENUTUP

Kebijakan pembangunan kebudayaan masa depan sebagaimana terurai dalam bab terdahulu dapat diwujudkan jika dalam pelaksanaannya terdapat iklim yang kondusif sesuai dengan tuntutan reformasi dan adanya kehendak yang sama dari semua pihak yang berperan terhadap pembudayaan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dapat lebih memberdayakan tugas dan fungsinya sebagai institusi pembina dan pengembangan kebudayaan masa depan, baik lewat jalur sekolah sebagai lembaga yang strategis dalam proses pembudayaan bangsa maupun melalui pendidikan luar sekolah, dan unit-unit pembina kebudayaan lainnya.

Harapan terbentuknya kebudayaan nasional masa depan (yang diharapkan) dapat dicapai setahap demi setahap, melalui pelaksanaan kebijakan yang serius, jujur dan kreatif serta komitmen yang kuat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan.

PUSTAKA ACUAN

- Agung Iskandar (1998). *Kebudayaan Indonesia Masa Depan: Mantap dan Kukuhnya Integrasi Nasional*", paper disajikan dalam **Diskusi Pengkajian Kebudayaan Indonesia Masa Depan** yang diselenggarakan Pusat Penelitian Balitbang Dikbud, Desember 1998
- Aziz Abdul (1998). *"Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Keniscayaan Budaya Masa Depan"*, paper disajikan dalam **Diskusi Pengkajian Kebudayaan Indonesia Masa Depan** yang diselenggarakan Pusat Penelitian Balitbang Dikbud, Desember 1998
- Aziz Abdul (1998). *"Rencana Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan"*, paper disajikan dalam **Diskusi Pengkajian Kebudayaan Indonesia Masa Depan** yang diselenggarakan Pusat Penelitian Balitbang Dikbud, Desember 1998
- BALITBANG DIKBUD (1994/1995). *Evaluasi Kemangkusan Pencapaian Sasaran dan Program Pendidikan dan Kebudayaan.*
- BALITBANG DIKBUD (1995/1996). *Evaluasi Kemangkusan Pencapaian Sasaran dan Program Pendidikan dan Kebudayaan.*
- BALITBANG DIKBUD (1996/1997). *Evaluasi Kemangkusan Pencapaian Sasaran dan Program Pendidikan dan Kebudayaan.*
- BALITBANG DIKBUD (1997/1998). *Evaluasi Kemangkusan Pencapaian Sasaran dan Program Pendidikan dan Kebudayaan.*
- Belen, S (1998). *"Kebudayaan Nasional Masa Depan"*, paper disajikan dalam **Diskusi Pengkajian Kebudayaan Indonesia Masa Depan** yang diselenggarakan Pusat Penelitian Balitbang Dikbud, Desember 1998

- Waluyo Harry (1998). *"Arti Penting Kebudayaan Etnik di Masa Depan: Sebuah Refleksi"*, paper disajikan dalam **Diskusi Pengkajian Kebudayaan Indonesia Masa Depan** yang diselenggarakan Pusat Penelitian Balitbang Dikbud, Desember 1998
- Suprastowo Philip (1998). *"Kerangka Acuan Pengkajian Kebudayaan Indonesia (Nasional) Masa Depan"*, Jakarta: Pusat Penelitian Balitbang Dikbud
- Soerjanto P (1993). *Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya; Sebuah Pendekatan Filsafat*, Gramedia, Jakarta.
- Soerjanto P (1993). *Strategi Kebudayaan; Suatu Pendekatan Filosofis*, Gramedia, Jakarta.
- Soerjono (1998). *"Pokok-pokok Pikiran sebagai Penyiapan Langkah-langkah Kebijaksanaan dalam Kaitan dengan Kebudayaan"*, paper disajikan dalam **Diskusi Pengkajian Kebudayaan Indonesia Masa Depan** yang diselenggarakan Pusat Penelitian Balitbang Dikbud, Desember 1998

ISBN 979-401-395-1

Perpustakaan
Jenderal

65